

# ANALISIS IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN SITUBONDO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

**SKRIPSI**

Oleh

**BAGUS KURNIAWAN PUTRA NIM : 201912059**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO 2023 2023**

****

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN SITUBONDO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Oleh

**BAGUS KURNIAWAN PUTRA NIM : 201912059**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO 2023 2023**

# PERSETUJUAN

# Judul Skripsi : “Analisis Implementasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”

# Nama : Bagus Kurniawan Putra

# NPM : 201912059

# Program Studi : Ilmu HUkum

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Situbondo, 15 Agustus 2023

Menyetujui

|  |  |
| --- | --- |
| Dosen Pembimbing Utama | Dosen Pembimbing Anggota |
| **Dyah Silvana Amalia, S.H., M.H.** | **Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.** |
| NIDN. 0701057603 | NIDN. 0717098503 |
| Menyetujui,  Kepala Program Studi Ilmu Hukum  **Yudistira Nugroho, S.H., M.H**  NIDN. 0721067402 | |

# PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bagus Kurniawan Putra

NPM : 201912059

Alamat : Jl. Pemuda RT. 02 RW.01 Situbondo

No. telpon (HP) : 081917960636

Menyatakan bahwa rancangan penelitian skripsi yang berjudul: “Analisis Implementasi Penanggulangan Hutan Di Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan diajukan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

|  |
| --- |
| Situbondo, 15 Agustus 2023 |
| Yang menyatakan |
| Bagus Kurniawan Putra |
| NPM. 201912059 |

# PENGESAHAN

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

# SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : Agustus

Tahun : 2023

# PENGUJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ketua | Anggota 1 | Anggota 2 | | |
| **Irwan Yulianto, S.H., M.H** | **Ide Prima Hadiyanto.,S.H.,M.H.** | | **Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H** |
| NIDN. 0717076701 | NIDN. 0717098503 | | NIDN. 0710028202 |

Mengesahkan

|  |
| --- |
| Dekan |
| **Irwan Yulianto, S.H., M.H** |
| NIDN. 0717076701 |

# MOTTO

Succes is the sum of small efforts, repeated day-in and day-out1.

- Robert Collier -

1 Robert, Collier (2013). Riches Within Your Reach, p.188, Distributed by Simon and Schuster

# PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Kurniawan Putra

NPM : 201912059

Alamat : Jl. Pemuda RT. 02 RW.01 Situbondo

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalty nonekslusif (Non- Exclusive Royalty Free Right) atas karya saya berjudul:

“Analisis Implementasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Situbondo Dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalty nonekslusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format- kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

|  |
| --- |
| Situbondo, 15 Agustus 2023 |
| Yang menyatakan, |
| Bagus Kurniawan Putra |
| NPM. 201912059 |

# KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya proposal skripsi berjudul “Analisis Implementasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Situbondo Dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.Si., Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Irwan Yulianto, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dyah Silvia Amalia, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal Ilmu Hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajaran di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat saya, Penuli

# ABSTRAK

Bagus Kurniawan Putra, NPM. 201912059, Analisis Implementasi Penanggulangan Hutan Di Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Penanggulangan Hutan Di Kabupaten Situbondo Dalam Persperktif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dilatarbelakangi oleh Kasus terbaru terjadi kebakaran seluas 2,5 Ha hutan jati di Desa Balung, Kecamatan Kendit pada petak 50 K Kelas hutan TKTBP, RPH Kendit, BKPH Panarukan akibat dari cuaca yang cukup panas karena kemarau panjang dan dugaan sementara sumber api yang membakar hutan jati di wilayah RPH Kendit ini, berasal dari pembakaran daun tebu yang sudah ditebang.

Penelitian bertujuan pertama untuk menganalisa dan mengkaji implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kedua untuk menganalisa dan mengkaji penyelesaian kendala dalam proses implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-

Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan pertama: Fakta dari beberapa kejadian kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo melalui wawancara bersama Kepala Damkar Kabupaten Situbondo yaitu Agus Prayogo, menunjukkan bahwa manajemen kebakaran di Kabupaten Situbondo lebih difokuskan pada aspek pemadaman daripada aspek pencegahan. Kedua:

**Kata kunci:** Implementasi Penanggulan, Kebakaran Hutan, Undang-Undang No.41 Tahun 1999

# ABSTRACT

Bagus Kurniawan Putra, NPM. 201912059, *Analysis of the Implementation of Forest Management in Situbondo Regency in the Perspective of Law Number 41 of 1999 Concerning Forestry*

*The research entitled Analysis of the Implementation of Forest Management in Situbondo District in the Perspective of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry is motivated by cases of forest fires in Situbondo Regency due to the long dry season which continues to spread. The most recent case was a fire in a 2.5 ha teak forest in Balung Village, Kendit District in plot 50 K Forest class TKTBP, RPH Kendit, BKPH Panarukan as a result of hot weather due to a long dry season and a temporary suspected source of fire burning teak forests in the area RPH Kendit, comes from burning sugarcane leaves that have been cut down.*

*The first aim of the research is to analyze and examine the implementation of forest fire management policies in Situbondo Regency according to the perspective of Law No. 41 of 1999 concerning forestry. The second is to analyze and examine the resolution of obstacles in the process of implementing forest fire management policies in Situbondo Regency according to the perspective of Law No. 41 of 1999 concerning forestry.*

*Based on the results, it can be concluded first: Facts from several incidents of forest fires in Situbondo Regency through interviews with the Head of the Situbondo Regency Damkar, namely Agus Prayogo, show that fire management in Situbondo Regency is more focused on extinguishing aspect rather than the prevention aspect. Second:*

***Key words:*** *Implementation of Countermeasures, Forest Fires, Law No.41 of 1999*

# DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_bookmark0)

[PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_bookmark1)

[LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI iii](#_bookmark2)

[PERNYATAAN ORISINALITAS iv](#_bookmark3)

[PENGESAHAN v](#_bookmark4)

[MOTTO vi](#_bookmark5)

[PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR vii](#_bookmark6)

[UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS vii](#_bookmark7)

[KATA PENGANTAR viii](#_bookmark8)

[ABSTRAK ix](#_bookmark9)

[ABSTRACT x](#_bookmark10)

[DAFTAR ISI xi](#_bookmark11)

[DAFTAR TABEL xiii](#_bookmark12)

[DAFTAR GAMBAR xiv](#_bookmark13)

[BAB I 1](#_bookmark14)

* 1. [Latar Belakang 1](#_bookmark15)
  2. [Rumusan Masalah 5](#_bookmark16)
  3. [Tujuan Penelitian 6](#_bookmark17)
  4. [Manfaat Penelitian 6](#_bookmark18)
  5. [Metode Penelitian 6](#_bookmark19)
  6. [Kerangka Konseptual 9](#_bookmark20)
  7. [Sistematika Penulisan 10](#_bookmark22)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11](#_bookmark23)

* 1. [Pengertian Hutan 11](#_bookmark24)
  2. [Faktor Penyebab Kebakaran Hutan 12](#_bookmark25)
  3. [Tinjauan Kebakaran Hutan Dalam Undang-Undang 15](#_bookmark26)
  4. [Gambaran Umum Hutan di Situbondo 17](#_bookmark27)
  5. [Kasus Kebakaran Hutan di Situbondo 21](#_bookmark30)
  6. [Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan 26](#_bookmark34)

[BAB III PROSES IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN](#_bookmark35) [HUTAN DI KABUPATEN SITUBONDO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-](#_bookmark35) [UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 33](#_bookmark35)

[BAB IV PENYELESAIAN KENDALA SELAMA PROSES IMPLEMENTASI](#_bookmark37) [PENANGGULAN KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN SITUBONDO 41](#_bookmark37)

[BAB V PENUTUP 51](#_bookmark38)

* 1. [Kesimpulan 51](#_bookmark39)
  2. [Saran 51](#_bookmark40)

[DAFTAR PUSTAKA 52](#_bookmark41)

# DAFTAR TABEL

[**Tabel 2.1** Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Situbondo 19](#_bookmark29)

[**Tabel 2.2** Kasus kebakaran hutan di kab. situbondo periode 2022 23](#_bookmark33)

[**Tabel 3.1** Kebijakan kebakaran hutan & lahan](#_bookmark36) [36](#_bookmark36)

# DAFTAR GAMBAR

[**Gambar 1.1** Kerangka Konseptual 9](#_bookmark21)

[**Gambar 2.1** Letak Geografis Kabupaten Situbondo](#_bookmark28) [18](#_bookmark28)

[**Gambar 2.2** Kasus kebakaran hutan & lahan di Kabupaten Situbondo](#_bookmark31) [22](#_bookmark31)

[**Gambar 2.3** SOP Penanggulangan Darurat Bencana](#_bookmark32) [23](#_bookmark32)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Bencana alam merupakan salah satu hal yang mempengaruhi ketahanan wilayah. Menurut undang-undang No. 24 Tahun 2007, bencana alam terbagi ke dalam 3 jenis antara lain bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Peraturan menteri (permen) lingkungan hidup No. 32 Tahun 2016 tentang pengendalian hutan menjelaskan jika bencana kebakaran hutan dan lahan adalah bencana alam berupa peristiwa kebakaran hutan dan lahan, baik itu secara alami ataupun karena aktivitas manusia sehingga berakibat pada kerusakan lingkungan yang berdampak pada kerugian ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan politik2. Kebakaran hutan atau kebakaran liar adalah kebakaran yang tidak terkendali yang dipicu oleh berbagai jenis angin, cuaca dan tutupan vegetasi, sebagian besar terjadi di area lahan liar, tetapi juga dapat mempengaruhi lahan pertanian, rumah, dan seluruh komunitas. Tidak seperti bencana alam lainnya, kebakaran hutan seringkali dimulai oleh manusia. Kebakaran hutan menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya, manusia, ternak, kehidupan liar, dan bangunan, dan membakar tanah seluas beberapa hektar dalam hitungan menit3.

Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan tidak dapat ditanggulangi tanpa adanya peran serta dari masyarakat karena bencana ini terjadi pada wilayah yang cukup luas dan titik api yang menyebar4. Penanggulangan bencana diatur menurut PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu pertama, pra bencana, meliputi keadaan meliputi dua keadaan

2 Utami, S., Armawi, A., Hadmoko, D.S. Implikasi peran pemuda dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan terhadap ketahanan wilayah (studi pada pemuda komunitas elite armada rimba sriwijaya, kabupaten ogan ilir, sumatra selatan). Jurnal ketahanan nasional. (2018), Vol.24(3) Hal: 306-325

doi:<http://dx.doi.org/10.22146/jkn.38349>

3 Dhall, A., Dhasade, A., Nalwade, A., et.al. A survey on systematic approaches in managing forest fires. Applied Geography. (2020), Vol.121 pp:1-19 https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102266

4 Ibid. Hlm.8

yaitu situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadi bencana. Kedua, saat bencana meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan sarana prasarana dengan segera. Ketiga, pasca bencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Periode tahun 1990an, sekitar 31% hutan di Indonesia jatuh ke tangan para penambang dan pengembang lahan. Awal 2000an tingkat penggundulan hutan sebesar 19%. Penyebab dari kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai tindakan alam atau buatan tertentu yang menyebabkan bahan bakar hutan dan lahan menyala dan terbakar, misalnya pohon, semak belukar, dan lain-lain5. Sekitar 99% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti illegal logging dan pembukaan lahan, sedangkan faktor alam hanya 1%, seperti musim kemarau yang panjang dan kekeringan6. Pemerintah indonesia menyadari bahwa karhutla merupakan bagian dari masalah multidimensi sehingga diperlukan koordinasi antar lini dalam menangani kasus kebakaran tersebut. Koordinasi melalui pendekatan birokratif dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diperbarui dengan Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Inpres terakhir instansi pemerintah yang terlibat penanganan Karhutla terdiri dari 15 Menteri, 3 Menteri Koordinator dan 7 Lembaga Pemerintah7.

Hutan merupakan kawasan yang terdiri dari banyaknya pohon rimbun hingga membentuk suatu ekologi. Definisi hutan sendiri sangat beragam, dari

5 D’Evelyn, Savannah M., Jung, J., Alvarado, E., et.al. Wildfre, Smoke Exposure, Human Health, and Environmental Justice Need to be Integrated into Forest Restoration and Management. Current Enviromental Health Reports. (2022) Vol.9 pp:366-385 DOI: https://doi.org/10.1007/s40572-022-00355-7

6 Saputra, A.N., Iqbal, M., Adyatma, S. Pemetaan kebakaran hutan dan lahan di kota banjarbaru. Jurnal pendidikan geografi. (2023), Vol.10 No.1 doi: <http://dx.doi.org/10.20527/jpg.v10i1.12424>

7 Budiningsih, K. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal analisis kebijakan kehutanan. (2017), Vol.14(2) Hal:165-186

sudut pandang orang ekonomis hutan merupakan tempat menanam modal jangkapanjang yang sangat menguntungkan dalam bentuk Hak Pengusaha Hutan (HPH). Hutan Indonesia dikatakan sebagai salah satu paru-paru dunia yang berperan penting dalam menyumbang oksigen (O2) untuk kelangsungan makhluk hidup dan dapat menyerap gas karbon dioksida (CO2) yang berbahaya bagi manusia8. Hutan merupakan sumber daya alam yang harus dikelola agar dapat memberikan banyak manfaat bagi rakyat. Kawasan hutan dibagi ke dalam tiga kelompok diantaranya hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi dengan pengertian sebagai berikut9:

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Pasal 46 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 yang mengatur tentang kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi, dan produksi tercapai secara optimal dan lestari. Pasal 47 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk10:

8 Shafitri, L.D., Prasetyo, Y., Hani’ah. Analisis deforestasi hutan di provinsi riau dengan metode polarimetrik dalam pengindraan jauh. Jurnal Geodesi. (2018) Vol.7 No.1, hlm. 212.

9 Undang-Undang RI No.41 Tahun 1999, [https://www.rimbawan.com/regulasi/undang-](https://www.rimbawan.com/regulasi/undang-undang-republik-indonesia-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan/) [undang-republik-indonesia-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan/](https://www.rimbawan.com/regulasi/undang-undang-republik-indonesia-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan/) diakses pada 1 maret 2023

10 Kementrian Kehutanan, 2014, Statistika Kementrian Kehutanan Tahun 2013, Jakarta, hal. 1

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
2. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Kebakaran hutan terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya ulah manusia, faktor alam, dan perubahan iklim. Penyebab kebakaran hutan yang terbanyak karena tindakan dan kelalaian manusia. Ada yang menyebutkan hampir 90% kebakaran hutan disebabkan oleh manusia sedangkan 10% yang disebabkan oleh alam11. Kasus kebakaran hutan di kabupaten situbondo akibat kemarau panjang terus meluas. Kasus terbaru terjadi kebakaran seluas 2,5 Ha hutan jati di Desa Balung, Kecamatan Kendit pada petak 50 K Kelas hutan TKTBP, RPH Kendit, BKPH Panarukan akibat dari cuaca yang cukup panas karena kemarau panjang dan dugaan sementara sumber api yang membakar hutan jati di wilayah RPH Kendit ini, berasal dari pembakaran daun tebu yang sudah ditebang. Api yang merembet ke hutan disebabkan oleh tiupan angin kencang, namun itu hanya dugaan sementara karena penyebab pasti masih dalam proses penyelidikan12.

Dampak yang dirasakan penduduk setempat yaitu asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan. Asap tersebut dirasa sangat mengganggu, misalnya jarak pandang semakin berkurang, polusi, sampai mengganggu kesehatan penduduk. Jika berdampak pada kesehatan penduduk, maka berdampak juga pada perekonomian. Jika penduduk tadi seharusnya bisa menjalankan ativitas seperti bekerja, setelah adanya kebakaran hutan yang meyebabkan asap maka aktivitas akan terhambat. Tidak berjalannya aktivitas dapat berdampak pada proses perekonomian apabila berjalan lebih lama. Sejak Agustus awal hingga September tahun 2022, sudah puluhan titik lahan dan hutan yang

11 Tubulele, P. Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim. Jurnal Supremasi Hukum. (2014), Vol.3(3) Hal:118-142

12 Puriono, diambil dari [https://www.liputan6.com/amp/5061021/kebakaran-hutan-di-](https://www.liputan6.com/amp/5061021/kebakaran-hutan-di-situbondo-meluas-25-hektare-hutan-jati-dilalap-api) [situbondo-meluas-25-hektare-hutan-jati-dilalap-api](https://www.liputan6.com/amp/5061021/kebakaran-hutan-di-situbondo-meluas-25-hektare-hutan-jati-dilalap-api) diakses pada 10 Januari 2023

terbakar akibat kemarau panjang, dan sejumlah hutan tersebut adalah hutan produksi dan hutan lindung. Total ada sekitar 20 kasus kebakaran hutan di kabupaten situbondo pada periode tahun 202213. Keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik adalah tujuh bidang keamanan manusia. Keamanan lingkungan didefinisikan sebagai perlindungan manusia dari kehancuran alam yang terancam oleh manusia dan lingkungan alam yang semakin buruk dalam jangka pendek dan jangka panjang dari ekstraksi parah. Dengan berfokus pada individu sebagai objek rujukan utama keamanan, gagasan keamanan yang berpusat pada negara telah ditentang oleh konsep keamanan manusia. Keamanan rakyat lebih representatif dalam keamanan manusia daripada keamanan negara atau pemerintah14

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penanggulan Kebakaran Hutan di Kabupaten Situbondo dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo.

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan berdasarkan uraian latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Apakah proses implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan?
2. Bagaimana penyelesaian kendala selama proses implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan?

13 BNPB Nasional, diambil dari <https://gis.bnpb.go.id/> diakses pada 02 maret 2023

14 Fachrie, M. Indonesia’s forest fire and haze pollution: an analysis of human security. Malaysian journal of international relations. (2020), Vol.8 pp:104-117 doi: doi.org/10.22452/mjir.vol8no1.7

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuansebagai berikut:

1. Menganalisa dan mengkaji implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
2. Menganalisa dan mengkaji penyelesaian kendala selama proses implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

## Manfaat Penelitian

* + 1. **Manfaat Teoritis**

Bukti ilmiah analisis dan kajian-kajian implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

## Manfaat Praktis

* + - 1. Bahan rujukan dan gambaran kepada masyarakat tentang proses implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
      2. Bahan acuan akademisi untuk melakukan pengembangan penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan

## Metode Penelitian

* + 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisa terkait penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif undang- undang no.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Penelitian deskriptif

adalah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik tentang peristiwa sosial dan alam. Selain itu, penelitian deskriptif juga memaparkan, menjelaskan, dan menggambarkan terkait data yang ditemukan didalam penelitian15. Penulis didalam penelitian ini akan menguraiakan bagaimana penanggulangan kebakaran hutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi, dan produksi tercapai secara optimal dan lestari.

## Jenis dan Sumber Data

* + - 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen- dokumen artikel, majalah, surat kabar dan internet.

* + - 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa telaah pustaka (library research) dan studi dokumen dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas berupa buku, dokumen, jurnal, artikel, majalah atau surta kabar.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Hutan Jati Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Pemilihan tema penelitian dilakukan atas pertimbangan yang terkait dengan fakta yang terjadi di daerah hutan jati Kecamatan Kendit. Waktu dilaksanakan pada bulan April sampai Juni tahun 2023.

## Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya:

* + - 1. Wawancara

Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Wawancara dilakukan terhadap

15 Mahardika, I.M.S., Metodologi Penelitian (Unesa University Pess: Surabaya, 2015).

pemilik usaha berkaitan dengan hal-hal yang menjadi objek penelitian. Wawancara bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang kebakaran hutan.

* + - 1. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan pengamatan peneliti terhadap objek penelitian sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi yang sebenarnya. Informasi didapat dengan mendatangi langsung atau pengamatan di Hutan Jati Kecamatan Kendit.

* + - 1. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang digunakan dalan penelitian ini berupa foto dan gambar saat wawancara yang berguna untuk meningkatkan tingkat kreadibilitas atau kepercayaan dari proses observasi atau wawancara serta data mengenai kebakaran hutan.

* + - 1. Studi Literatur

Pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari buku- buku referensi, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan berupa data kementerian / BPS, skripsi, jurnal ataupun buku yang terkait dengan penelitian.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan analisis data meliputi perundang-undangan, buku kepustakaan, jurnal, studi literatur lainnya, dan kemudian akan disimpulkan. Sedangkan data kuantitatif akan digunakan sebagai data pelengkap dalam menjelaskan penelitian bersifat kualitatif.



Implementasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Situbondo Sesuai Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Bagaimana penyelesaian kendala selama proses implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan?

* Wawancara
* Observasi
* Dokumentasi
* Studi Literatur

Apa implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan?

* Wawancara
* Observasi
* Dokumentasi
* Studi Literatur

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur tentang kehutanan. Pasal 46 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 yang mengatur tentang kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi, dan produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Saran

Kesimpulan

## Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya dan didapat dari permasalahan yang ingin diteliti. Kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini:

**Gambar 1.1** Kerangka Konseptual

## Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika dengan perincian sebagai berikut: BAB I Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang gambaran umum kondisi hutan, dan kasus kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo, serta kebijakan penanggulangan kebakaran hutan.

BAB III Pembahasan I

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai rumusan masalah pertama, yaitu membahas implementasi kebijakan penanggulan hutan di kabupaten situbondo dalam perspektif undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

BAB IV Pembahasan II

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan sesuai rumusan masalah kedua, yaitu membahas bagaimana penyelesaian kendala selama proses implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di kabupaten situbondo sesuai perspektif undang-undang no.41 tahun 1999 tentang kehutanan

BAB V Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan adalah penyederhanaan dari hasil analisis dan jawaban terhadap masalah penelitian. Saran berisi tentang masukan atau kontribusi dari hasil kesimpulan masalah penelitian.

Daftar Pustaka

Berisi tentang sumber atau literatur atau referensi yang digunakan di dalam penelitian ini yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang- undangan, dan lain-lain.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Hutan

Hutan adalah kumpulan pepohonan berjajar rapat dan menutupi wilayah yang luas sehingga terbentuk iklim mikro dengan kondisi ekologi yang berbeda dengan wilayah tersebut dan bersifat unik. hutan merupakan beraneka ragam jenis tumbuhan dan hewan yang bersekutu dalam asosiasi biotis dimana asosiasi tersebut bersama lingkungan disekitarnya membentuk sistem ekologis dan organisme yang saling mempengaruhi sehingga terbentuk siklus energi yang kompleks. Hutan merupakan komunitas biologi dimana mayoritas terdiri atas pohon-pohon yang merupakan tanaman keras.

Hutan dari segi status dipandang dari sisi kepemilikan hutan, dimana ada 2 macam kepemilikan hutan yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun arti dari hutan negara adalah hutan yang berstatus milik negara. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berstatus milik individu atau badan hukum lainnya. Pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Hutan merupakan kawasan yang terdiri dari banyaknya pohon rimbun hingga membentuk suatu ekologi. Hutan sebagai tempat kehidupan hewan memiliki keanekaragaman dan sumber daya alam yang sangat diperlukan di dalam kehidupan ini16. Hutan Indonesia dikatakan sebagai salah satu paru- paru dunia yang berperan penting dalam menyumbangkan oksigen (O2) untuk kelangsungan makhluk hidup dan dapat menyerap gas karbon dioksida (CO2)

yang berbahaya bagi manusia17.

Hutan merupakan sumber daya alam yang harus dikelola agar dapat memberikan banyak manfaat bagi rakyat. Kawasan hutan dibagi ke dalam tiga

16 Tacconi, L., Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan.

(Bogor: CIFOR Occasional Paper No.38 (i), 2003)

17 Shafitri, L.D., Prasetyo, Y., Hani’ah. Analisis deforestasi hutan di provinsi riau dengan metode polarimetrik dalam pengindraan jauh. Jurnal Geodesi, Vol.7 No.1, 2018, hlm. 212.

11

kelompok diantaranya hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi dengan pengertian sebagai berikut18:

* + 1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
    2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
    3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Sedangkan pada Pasal 46 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 yang mengatur tentang Kehutanan, Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi, dan produksi tercapai secara optimal dan lestari. Berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk19:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
2. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

## Faktor Penyebab Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan dan kehutanan yang krusial serta menjadi perhatian lokal dan global. Upaya penanggulangannya sudah lama dilakukan tetapi keberhasilannya relatif

18 Undang-Undang RI No.41 Tahun 1999, [https://www.rimbawan.com/regulasi/undang-](https://www.rimbawan.com/regulasi/undang-undang-republik-indonesia-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan/) [undang-republik-indonesia-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan/](https://www.rimbawan.com/regulasi/undang-undang-republik-indonesia-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan/) diakses pada 1 maret 2023

19 Kementrian Kehutanan, 2014, Statistika Kementrian Kehutanan Tahun 2013, Jakarta, hal. 1

rendah. Kebakaran hutan seringkali terjadi secara alami di daerah vegetasi kering. Kebakaran hutan disebut sebagai kebakaran semak atau kebakaran gurun tergantung pada area di mana hal ini terjadi. Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Secara umum, kebakaran hutan yang terjadi secara alami merupakan bagian dari ekosistem alam. Cuaca yang makin panas dan lebih kering yang disebabkan oleh perubahan iklim dan pengelolaan lahan yang buruk menciptakan kondisi yang memudahkan terjadinya kebakaran hutan lebih sering dan berintensitas tinggi.

Penyebab terjadinya kebakaran hutan, yaitu karena sebab alami dan karena ulah manusia. Penyebab terjadinya kebakaran hutan secara alami sebagai contohnya adalah adanya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api20. Sementara itu, penyebab terjadinya kebakaran hutan karena ulah manusia di antaranya dikarenakan oleh beberapa kegiatan seperti kegiatan ladang, perkebunan (PIR), Hutan Tanaman Industri (HTI), penyiapan lahan untuk ternak sapi, ekstraksi hasil hutan bukan kayu, pengembangan industri, pemukiman kembali, perburuan, kelalaian, dan sebagainya. Penyebab lainnya yang berasal dari manusia adalah nyala api, rokok, percikan listrik, atau sumber api lainnya bersentuhan dengan bahan yang mudah terbakar.

Aktivitas masyarakat mengolah lahan pertanian/perkebunan dengan menggunakan metode tebas-bakar (slash and burn) juga menjadi penyebab kebakaran hutan. Masyarakat memilih metode tersebut karena mempertimbangkan beberapa hal seperti keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan mobilitas menuju lahan, serta keterbatasan modal. Alhasil, pembakaran menjadi salah satu cara penyiapan lahan yang paling mudah dan murah. Pembukaan lahan dengan cara membakar ini berisiko meluas sehingga menyebabkan kebakaran hutan. Maka dari itu, perlu metode

20 Cahyono, S. Andy., Warsito, S.P., Andayani W., & Darwanto, D.H. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di indonesia dan implikasi kebijakannya. Jurnal Slvya Lestari. Vol.3 No.1

penyiapan lahan tanpa bakar (zero burning) sebagai solusi yang harus ditetapkan dan dilaksanakan. Akan tetapi, umumnya diperlukan bantuan alat- alat mekanis yang tidak murah pengadaannya. Di sinilah peran pemerintah untuk menjadi pendukung agar upaya pembukaan lahan tanpa pembakaran bisa terwujud.

Aktivitas manusia yang lalai juga bisa menjadi penyebab kebakaran hutan, salah satunya dari api unggun. Momen ketika api unggun menjadi penyebab kebakaran hutan antara lain:

* + 1. Api unggun dibiarkan tanpa pengawasan. Membiarkan api unggun tanpa pengawasan membuatnya bisa membakar banyak benda di sekitar dan akan menjadi besar serta memicu terjadinya kebakaran hutan.
    2. Api unggun menjadi tidak terkendali. Dalam beberapa situasi, beberapa orang mungkin tidak sadar jika ia membuat nyala api unggun terlalu besar. Hal ini bisa menyebabkan panik dan menimbulkan kebakaran hutan.
    3. Api unggun sepenuhnya tidak padam. Momen ini cukup sering terjadi ketika beberapa orang merasa jika apinya telah padam padahal sebenarnya belum. Perlu diketahui, jika bara masih panas, maka api dapat menyala kembali. Maka dari itu, sebelum meninggalkan api unggun pastikan bara api benar-benar mati.

Kebakaran di Indonesia yang menghanguskan kawasan hutan perdu di lereng Gunung Sindoro akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Menurut otoritas setempat penyebab kebakaran kemungkinan karena faktor manusia dalam hal ini pendaki yang lalai tidak mematikan api unggun di puncak sebelum turun gunung. Perburuan satwa liar juga bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan. Apalagi jika perburuan dilakukan menggunakan senapan api. Selain itu, pemburu juga biasanya akan mendirikan tenda dan membuat api unggun baik untuk memasak atau sekadar menghangatkan diri. Api unggun dan aktivitas bakar-bakar itulah yang jika dilakukan dengan ceroboh bisa menimbulkan kebakaran hutan.

Angin merupakan salah satu faktor penting dari faktor-faktor cuaca yang menjadi penyebab kebakaran hutan. Angin bisa menyebabkan kebakaran hutan melalui beberapa cara. Angin membantu pengeringan bahan bakar yaitu sebagai pembawa air yang sudah diuapkan dari bahan bakar. Lebih lanjut, tiupan angin juga memperbesar kemungkinan membesarnya nyala api

dari sumber seperti korek api, obor, dan kilat. Sekali nyala api tersulut, maka kecepatan pembakaran dan perkembangan api akan meningkat seiring membesarnya tiupan angin.

Penyebab kebakaran hutan berikutnya adalah adanya akumulasi serasah daun kering. Serasah daun kering adalah limbah yang berasal dari sisa tanaman yang berupa daun-daun kering. Biasanya serasah daun ini berjatuhan dan berkumpul di bawah-bawah pohon. Keberadaannya memang bisa menjadi penambah hara tanah. Namun, serasah daun kering juga bisa memperparah atau membuat kebakaran bertambah besar. Akumulasi serasah kering merupakan bahan bakar yang dapat mempengaruhi perilaku api, bukan sebagai sumber api penyebab kebakaran. Aktivitas pembakaran juga dilakukan oleh beberapa orang dan petani pada musim kemarau di padang penggembalaan. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan rumput- rumput muda sehingga persediaan pakan tetap terjamin.

## Tinjauan Kebakaran Hutan Dalam Undang-Undang

Hutan dan kehutanan dalam UU No. 24 Tahun 200721 Tentang Kehutanan ini tercantum pada Pasal 1, berbunyi sebagai berikut:

* + 1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
    2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
    3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan dalam undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem tercantum dalam Pasal 1, yang berbunyi taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan / atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. hutan dalam undang-undang

21 Undang-Undang No.24 Tahun 2007

tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tercantum dalam Pasal 1, yang berbunyi Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Selain ketiga undang-undang tersebut, segala hal yang berkaitan dengan hutan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya22. Ketentuan dalam pasal 3 yaitu Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pasal 4 yaitu Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Pasal 5 yaitu Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

1. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup23. Bab III tentang hak, kewajiban, dan peran masyarakat dituang dalam pasal 5 ayat 1-3 berisi tentang:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

23 Undang-undang

1. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 ayat 1-2 berisi tentang:

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7 ayat 1-2 berisi tentang:

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
   1. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
   2. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
   3. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
   4. memberikan saran pendapat;
   5. menyampaikan informasi dan/atau menyapaikan laporan.

## Gambaran Umum Hutan di Situbondo

Hasil pemantauan luas lahan berhutan seluruh daratan di Indonesia pada tahun 2020 seluas 95,6 juta Ha atau sekitar 50,9% dari total daratan, dan seluas 88,4 juta Ha atau sekitar 92,5% dari total luas daratan berada di dalam kawasan hutan. Kabupaten Situbondo memiliki luas 1.638,50 km2 atau sekitar 163.850 Ha yang mempunyai bentuk memanjang dari barat ke timur

±150 km di pantai utara tapal kuda, jawa timur dan terdiri dari 17 kecamatan mulai dari ujung barat hingga timur. Luas kawasan hutan dan perairan

menurut kecamatan di Kabupaten Situbondo terbagi menjadi hutan lindung, hutang produksi, serta suaka alam dan pelestarian alam.



**Gambar 2.1** Letak Geografis Kabupaten Situbondo**24**

Hutan lindung di Kabupaten Situbondo memiliki luas 24.8787,59 Ha dengan luas hutan lindung terbesar berada di kecamatan banyuputih sekitar 6.240,23 Ha, kecamatan arjasa sekitar 4.713,60 Ha dan kecamatan bungatan sekitar 4.109,14 Ha. Hutan produksi di kabupaten situbondo dibagi menjadi hutan produksi terbatas dengan luas kawasan hutan seluas 933,81 Ha dan hutan produksi tetap seluas 37.336,48 Ha. Luas kawasan hutan produksi terbatas terbesar diketahui berada di kecamatan mlandingan dengan luas seluas 272,12 Ha, kecamatan arjasa seluas 230,10 Ha, dan di kecamatan situbondo seluas 199,80 Ha. Sedangkan luas terbesar hutan produksi tetap berada di kecamatan banyuputih seluas 15.905,52 Ha, kemudian kecamatan asembagus seluas 5.537,67 Ha, dan di kecamatan arjasa seluas 4.124,98 Ha. Kemudian data luas kawasan hutan dan perairan kabupaten situbondo tidak ada data tentang seberapa besar luas kawasan hutan dalam kategori suaka alam dan pelestarian alam. Berikut daftar luas kawasan hutan menurut kecamatan di kabupaten situbondo25:

24 BPS Kab. Situbondo, <https://situbondokab.bps.go.id/> Diakses 01 Maret 2023

25Ibid, BPS Kab. Situbondo.

**Tabel 2.1** Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Situbondo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kecamatan** | **Hutan Lindung**  **(Ha)** | **Hutan Produksi (Ha)** | |
| **Terbatas** | **Tetap** |
| 1 | Sumbermalang | 2 381.80 | - | 1 273.71 |
| 2 | Jatibanteng | 42.20 | 9.60 | 183.40 |
| 3 | Banyuglugur | 68.20 | - | 3 375.10 |
| 4 | Besuki | 3 864.40 | 9.20 | 99.50 |
| 5 | Suboh | - | - | - |
| 6 | Mlandingan | 734.77 | 272.12 | 2 024.57 |
| 7 | Bungatan | 4 109.14 | 32.95 | 1 179.88 |
| 8 | Kendit | 1 820.36 | - | 1 806.12 |
| 9 | Panarukan | - | 25.00 | 496.69 |
| 10 | Situbondo | 172.80 | 199.80 | 95.16 |
| 11 | Mangaran | - | - | - |
| 13 | Panji | - | - | - |
| 13 | Kapongan | - | - | - |
| 14 | Arjasa | 4 713.60 | 230.10 | 4 124.98 |
| 15 | Jangkar | 276.85 | 155.04 | 1 234.18 |
| 16 | Asembagus | 454.24 | - | 5 537.67 |
| 17 | Banyuputih | 6 240.23 | - | 15 905.52 |
| **Jumlah** | | **24 878.59** | **933.81** | **37 336.48** |

Berdasarkan tabel diketahui kawasan hutan lindung di kabupaten situbondo terbagi di 12 kecamatan, hutan produksi terbatas terbagi di 8 kecamatan, dan hutan produksi tetap terbagi di 12 kecamatan. Total keseluhuran luas kawasan hutan dan perairan di kabupaten situbondo seluas 63.148,88 Ha.

Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebagaimana diatur dalam PP.RI. Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan

Negara26. Tugas dan kewajiban Perusahaan Umum Kehutanan Negara antara lain:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
2. Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
3. Tata hutan dan penyusanan rencana Pengelolaan Hutan
4. Rehabilitasi dan reklamasi
5. Perlindungan hutan dan konservasi alam
6. Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi
7. Pendidikan dan pelatihan di bidang Kehutanan
8. Pengembangan agroforestry
9. Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat
10. Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain

Pengelolaan kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Situbondo dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso dan Situbondo yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 200327. Perum Perhutani KPH Bondowoso dan Situbondo termasuk ke dalam salah satu unit kerja pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

* 1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
  2. Sebelah selatan berbatasan dengan KPH Jember.
  3. Sebelah timur berbatasan dengan KPH Banyuwangi Utara dan KPH Banyuwangi Barat.
  4. Sebelah barat berbatasan dengan KPH Probolinggo.

26 Perum Perhutani KPH Bondowoso-Situbondo, diambil dari <https://www.perhutani.co.id/> diakses pada 01 maret 2023

27 Ibid, Perum Perhutani KPH Bondowoso-Situbondo

Perum perhutani Kesatuan Pemangkua Hutan (KPH) Bondowoso Situbondo merupakan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2003.

## Kasus Kebakaran Hutan di Situbondo

Kebakaran hutan atau jika disingkat Karhutla adalah kejadian bencana alam yang selalu terjadi setiap tahun. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistim berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan28. Kebakaran hutan adalah satu bentuk gangguan yang sering terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi perhatian lokal maupun global29. Kebakaran hutan terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya ulah manusia, faktor alam, dan perubahan iklim. Penyebab kebakaran hutan yang terbanyak karena tindakan dan kelalaian manusia. Ada yang menyebutkan hampir 90% kebakaran hutan disebabkan oleh manusia sedangkan 10% yang disebabkan oleh alam. Pengertian dan definisi lain yang diberikan untuk kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistim sampai terancamnya kelestarian lingkungan. Upaya pencegahan kebakaran hutan merupakan suatu usaha perlindungan hutan agar kebakaran hutan yang berdampak negatif tidak meluas.

Dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini merupakan permasalahan yang sangat penting di tanah air. Dampak dari karhutla adalah hilangnya ekosistem dari hutan dan potensi lain yang terkandung di dalamnya temasuk keanekaragaman hayati30. Dampak kebakaran hutan dan lahan yang menonjol adalah terjadinya kabut asap yang menganggu kesehatan dan sistem transpotasi darat, laut dan udara. Intensitas gangguan terhadap hutan ini, semakin meningkat dari waktu ke waktu baik yang disebabkan oleh faktor

28 Ibid, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999

29 Cahyono, S.A., et.al. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di indonesia dan implikasi kebijakannya. Jurnal Sylva Lestari (Vol.3 No.1, 2015) hlm.103

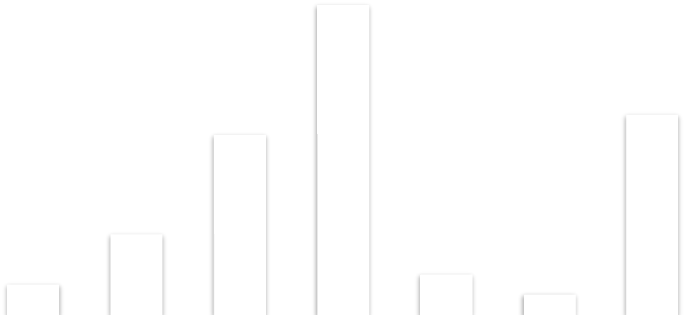
30 Arisman., Analisis Tren Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Periode Tahun 2015- 2019. Jurnal sains teknologi & lingkungan (Vol.6 No.1, 2020) hlm.1

alam maupun manusia. Berikut kejadian kebakaran hutan di kabupaten situbondo pada periode tahun 2015-201931;

35

31

30



20

18

8

3

2

4

25

20

15

10

5

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 Tahun

**Gambar 2.2** Kasus kebakaran hutan & lahan di Kabupaten Situbondo periode tahun 2015-202232

Hasil analisis menunjukkan pada periode tahun 2015-2022 terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 86 kejadian. Kasus kebakaran hutan dan lahan tertinggi pada tahun 2019 lalu disusul pada tahun 2022. Frekuensi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, Puncak kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 31 kejadian. Puncak kejadian di bulan Agustus, dan sebaliknya fenomena kejadian terendah terjadi pada bulan Januari. Standar operasional prosedur (SOP) penanganan darurat bencana jika terjadi bencana termasuk kebakaran hutan dan lahan diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan peraturan presiden nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana33. Berikut

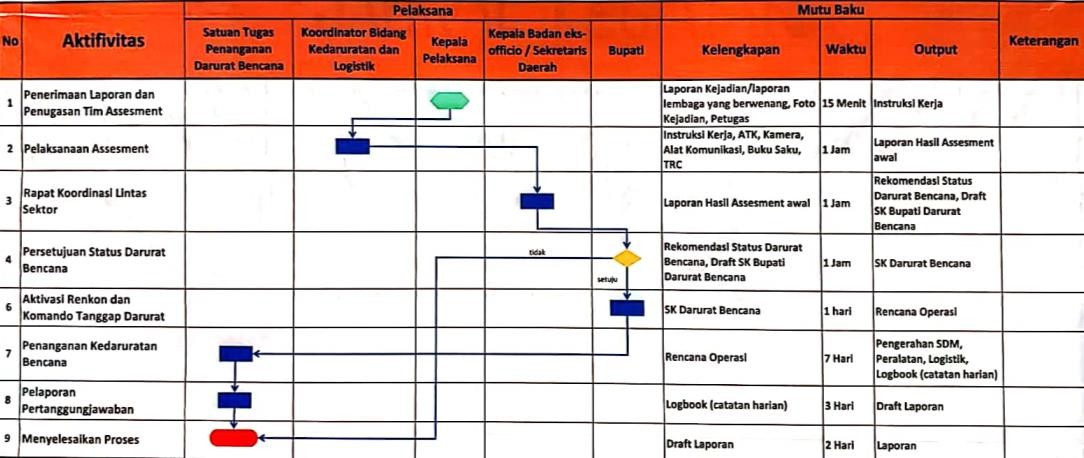
31 Ibid, Arisman. hlm.2

32 BNPB Nasional, diambil dari <https://gis.bnpb.go.id/> diakses pada 02 maret 2023

33 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, [https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-](https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-24-2007PenanggulanganBencana.pdf)

[24-2007PenanggulanganBencana.pdf](https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-24-2007PenanggulanganBencana.pdf) diakses pada 12 Juni 2023

ini adalah gambaran SOP (standar operasional prosedur) penanggulangan darurat bencana di Kabupaten Situbondo34.



**Gambar 2.3** SOP Penanggulangan Darurat Bencana

Kasus kebakaran hutan di kabupaten situbondo akibat kemarau panjang terus meluas. Kasus terbaru terjadi kebakaran seluas 2,5 Ha hutan jati di Desa Balung, Kecamatan Kendit pada petak 50 K Kelas hutan TKTBP, RPH Kendit, BKPH Panarukan akibat dari cuaca yang cukup panas karena kemarau panjang dan dugaan sementara [sumber api](https://www.liputan6.com/surabaya/read/5059922/bbm-campur-air-di-spbu-pesangggaran-banyuwangi-pertamina-akui-ada-kelalaian) yang membakar hutan jati di wilayah RPH Kendit ini, berasal dari pembakaran daun tebu yang sudah ditebang. Api yang merembet ke hutan disebabkan oleh tiupan angin kencang, namun itu hanya dugaan sementara karena penyebab pasti masih dalam proses penyelidikan35. Sejak Agustus awal hingga September tahun 2022, sudah puluhan titik lahan dan hutan yang terbakar akibat kemarau panjang, dan sejumlah hutan tersebut adalah hutan produksi dan hutan lindung. Berikut data kasus kejadian kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo pada tahun 202236;

**Tabel 2.2** Kasus kebakaran hutan di kab. situbondo periode 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal**  **Kejadian** | **Kejadian** | **Lokasi** | **Penyebab** |
| 27/09/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec.Kendit, Ds.  Klatakan | - |

34 BPBD Kabupaten Situbondo, Sumber: Foto Pribadi. 8 Juni 2023

35 Puriono, diambil dari [https://www.liputan6.com/amp/5061021/kebakaran-hutan-di-](https://www.liputan6.com/amp/5061021/kebakaran-hutan-di-situbondo-meluas-25-hektare-hutan-jati-dilalap-api) [situbondo-meluas-25-hektare-hutan-jati-dilalap-api](https://www.liputan6.com/amp/5061021/kebakaran-hutan-di-situbondo-meluas-25-hektare-hutan-jati-dilalap-api) diakses pada 10 Januari 2023

36 BNPB Nasional, diambil dari <https://gis.bnpb.go.id/> diakses pada 02 maret 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/09/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec. Kapongan,  Ds. Seletreng | Dalam penyelidikan pihak berwajib |
| 17/09/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec. Panarukan,  Ds. Bringin | Dalam proses penyelidikan |
| 16/09/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec. Kendit, Ds.  Klatakan | Dalam proses penyelidikan |
| 12/09/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec. Suboh, Ds.  Gunung Malang | **-** |
| 07/09/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec. Arjasa, Ds.  Lamongan | Dalam penyelidikan pihak berwajib |
| 30/08/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec. Panarukan,  Ds. Sumberkolak | Dalam penyelidikan pihak berwajib |
| 29/08/2022 | Kebakaran Hutan & Lahan | Kec. Panji, Kel. Mimbaan | Hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB telah terjadi kebakaran Lahan & tumbuhan liar / ilalang di atas perbukitan perumahan Sampit Panji Permai (Perumahan 50  Resetlemen) |
| 22/08/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec. Panarukan,  Ds. Sumberkolak | Dalam proses penyelidikan |
| 20/08/2022 | Kebakaran Hutan & Lahan | Kec. Kendit, Ds. Balung | 1. Terjadi kebakaran hutan dan lahan Di Petak 50 K Klas hutan TKTBP (Tanah Kosong Tidak Baik untuk Produksi) RPH Kendit BKPH Panarukan 2. Tidak diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut dan masih dalam penyelidikan pihak   Perhutani setempat |
| 19/08/2022 | Kebakaran Hutan & Lahan | Kec. Panji, Ds. Seliwung | 1. Telah terjadi Kebakaran lahan kosong yang merembet ke TPA. dan Tidak diketahui pasti  penyebab kebakaran tersebut |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dan masih dalam penyelidikan  pihak berwajib |
| 18/08/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec. Kendit, Ds.  Kukusan | Diduga sengaja dibakar oleh orang  yg tdk bertanggung jawab |
| 17/08/2022 | Kebakaran Hutan & Lahan | Kec. Kendit, Ds. Bugeman | Tidak diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut dan masih  dalam penyelidikan pihak berwajib |
| 16/08/2022 | Kebakaran Hutan & Lahan | Kec. Panji, Ds. Juglangan | Tidak diketahui pasti penyebab  kebakaran tersebut dan masih dalam penyelidikan pihak berwajib |
| 15/08/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec. Kendit, Ds.  Klatakan | Di duga sengaja dibakar oleh  orang yg tdk bertanggung jawab |
| 14/08/2022 | Kebakaran Hutan & Lahan | Kec. Situbondo, Ds. Kotakan | Belum diketahui dalam penyelidikan pihak berwajib |
| 14/08/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec. Panarukan,  Ds. Sumberkolak | Dalam penyelidikan pihak berwajib |
| 09/08/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec.Panarukan,  Ds. Sumberkolak | Tidak diketahui & dalam  penyelidikan pihak berwajib |
| 01/08/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec. Panarukan,  Ds. Sumberkolak | Tidak diketahui & dalam  penyelidikan pihak berwajib |
| 25/07/2022 | Kebakaran  Hutan & Lahan | Kec. Panarukan,  Ds. Sumberkolak | Masih dalam penyelidikan pihak  yang berwajib |

Keterangan: Kec; Kecamatan, Ds; Desa.

Kejadian kebakaran hutan dan lahan ini merupakan kejadian yang terus berulang, pada periode tahun 2022 terdapat banyak kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan tabel tersebut serta merujuk pada Pasal 46 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 yang mengatur tentang kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi, dan produksi tercapai secara optimal dan lestari, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2003, maka kasus kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan

karena dapat berdampak kepada keamanan manusia (human security) di kemudian hari.

## Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan

Kondisi geografis menjadi salah satu faktor dalam pengelolaan hutan serta pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan hutan. Upaya untuk menyelamatkan hutan tentunya tidak dapat dilepaskan dari identifikasi masalah kehutanan secara tepat serta fundamental dengan menggunakan informasi yang akurat sehingga menentukan capaian perbaikan kinerja kehutanan. Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 berisi tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mengupayakan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan, selain itu juga Presiden mendorong perkuatan koordinasi lintas instansi (pusat dan daerah), peningkatan peran serta masyarakat/pemangku kepentingan serta mewujudkan penegakan hukum kepada pelaku yang terlibat pembakar lahan dan hutan baik perorangan atau badan hukum37.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah, mulai yang bersifat antisipatif (pencegahan) maupun penanggulangannya. Upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan dengan membentuk Sub Direktorat Kebakaran Hutan dan Lembaga non struktural berupa Pusdalkarhutnas, Pusdalkarhutda dan Satlak serta pemadam kebakaran hutan di masing-masing HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri). Selain itu, pemerintah telah memberikan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan38. Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, yang menyebut bahwa Organisasi Pengendali Kebakaran Hutan (Dalkarhutla) dibentuk berdasarkan Tingkat

37 Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/>

diakses pada 1 maret 2023

38 Umasangaji, S., Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah (Vol.15 No.2, 2017), hlm.85-164

Pemerintahan dan Tingkat Pengelolaan39. Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintahan terdiri dari tingkat Pemerintah, tingkat Pemerintah Provinsi, dan tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka dari hal ini semakin jelas bahwa peran aktor dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah40.

Regulasi dalam penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah diatur oleh pemerintah, antara lain41:

* + 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078)
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)
    4. Peraturan Menteri Kehutanan No. 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
    5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
    7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan meliputi upaya pencegahan dan pengendalian harus dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan terpadu

39 Yani, A., Suryani, A., Saharjo, B.H., et.al., Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Pontianak, 2020) hlm.3

40 Ibid, Umasangaji hlm.123

41 Usup, I., Buku Panduan Sistem Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Berbasis Masyarakat Untuk Kawasan Hutan dan Lahan Gambut Tropis di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. (Universitas Palangkaraya, 2015) hlm.2

dengan cara melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Tindakan pencegahan merupakan komponen terpenting dari seluruh sistem penanggulangan bencana termasuk kebakaran. Apabila pencegahan dilakukan dengan baik, maka seluruh bencana kebakaran dapat diminimalisir atau dihilangkan sumber api di lapangan. Upaya ini pada dasarnya harus dimulai sejak awal proses pembangunan sebuah wilayah, seperti sejak penetapan fungsi wilayah, perencanaan tata guna hutan/lahan, pemberian ijin bagi kegiatan hingga pemantauan dan evaluasi.

Penyelesaian permasalahan kehutanan bukan hanya menentukan pokok permasalahnya, tetapi juga membutuhkan strategi tentang bagaimana cara dan solusi terkait masalah-masalah tersebut mampu dan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Supaya strategi tersebut mampu dan dapat dilakukan secara optimal dan maksimal, maka prasyarat kelembagaan dan kepemimpinan (leadership) kehutanan menjadi sebuah keharusan. Upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mencegah timbulnya api antara lain:

1. Penatagunaan lahan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya masing- masing dengan mempertimbangkan kelayakannya secara ekologis disamping secara ekonomis
2. Pengembangan sistem budidaya pertanian dan perkebunan serta sistem produksi kayu yang tidak rentan terhadap kebakaran, seperti pembukaan dan persiapan lahan tanpa bakar (zeroburning-based land cleaning), atau dengan pembakaran yang terkendali (controlled burning-based land cleaning).
3. Pengembangan sistem kepemilikan lahan secara jelas dan tepat sasaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghindari pengelolaan lahan yang tidak tepat sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.
4. Pencegahan perubahan ekologi secara besar-besaran diantaranya dengan membuat dan mengembangkan pedoman pemanfaatan hutan dan lahan gambut secara bijaksana (wise use of peatland), dan memulihkan hutan dan lahan gambut yang telah rusak.
5. Pengembangan program penyadaran masyarakat terutama yang terkait dengan tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran serta dampak

yang akan terjadi. Program ini diharapkan dapat dan mampu mendorong pengembangan strategi pencegahan dan pengendalian kebakaran berbasis masyarakat (community-based fire management).

1. Pengembangan sistem penegakan hukum. Hal ini mencakup penyelidikan terhadap penyebab kebakaran serta mengajukan pihak-pihak yang diduga menyebabkan kebakaran ke pengadilan.
2. Pengembangan sistem informasi kebakaran yang berorientasi kepada penyelesaian masalah. Hal tersebut mencakup pengembangan sistem pemeringkatan bahaya kebakaran (Fire Danger Rating System) dengan memadukan dua iklim (curah hujan dan kelembaban udara), data hidrologis (kedalam muka air tanah dan kadar legas tanah), dan data bahan yang dapat memicu timbulnya api. Kegiatan ini akan memberikan gambaran secara kartografi terhadap kerawanan kebakaran.

Upaya yang dapat dilakukan apabila kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi antara lain mitigasi dengan tujuan untuk mengurangi dampak kebakaran hutan pada kesehatan serta transportasi karena asap, kemudian kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan diantaranya kesiapan peralatan kesehatan, kesediaan dan keaktifan alat pengukur debu, edukasi serta pemberitahuan kepada pihak terkait perihal bahaya kebakaran dan asap, pengembangan waduk air di wilayah dengan risiko kebakaran tinggi, serta pembuatan parit yang dapat mencegah terjadinya perluasan kebakaran42. Selain itu kesiagaan dalam pengendalian kebakaran bertujuan agar perangkat penanggulangan kebakaran dan dampaknya berada dalam keadaan siap digerakkan. Tidak hanya itu, tetapi proses membangun partisipasi masyarakat dikawasan risiko kebakaran dan ketaatan para pengusaha terhadap ketentuan penanggulangan kebakaran memiliki peranan penting dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian pemadaman api menjadi sangat penting karena upaya ditingkat lebih tinggi memerlukan persiapan lebih lama sehingga dikhawatirkan api sudah menyebar lebih luas. Pemadaman api

42 Waluyo, J., et.al., Buku Panduan: Tata Cara Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Berbasis Desa. (Kemitraan Patnership: Jakarta, 2020) hlm.32

dikawasan bergambut jauh lebih sulit daripada dikawasan yang tidak bergambut.

Penilaian dampak kebakaran dilakukan setelah terjadinya kebakaran, dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan dari berbagai sudut pandang, baik dari segi ekonomi, ekologi, sosial maupun kesehatan. Investigasi paska kejadian kebakaran harus segera dilakukan untuk mengetahui siapa penyebab kejadian kebakaran, bagaimana prosesnya dan berapa besar kerugian yang diakibatkan dan selanjutnya melakukan upaya yuridikasi untuk menuntut si pelaku ke muka pengadilan. Dalam upaya yuridikasi ini perlu koordinasi yang terkait antar beberapa instansi, polisi, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), LSM, dan para ahli. Para ahli kebakaran, tanah dan lingkungan dapat mendukung upaya penyelidikan dalam pengumpulan bukti-bukti serta hasil-hasil analisa yang dapat mengungkapkan bahwa kebakaran yang terjadi berasal dari penggunaan api yang ceroboh atau kebakaran tersebut dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu43.

Kegiatan rehabilitasi lahan bekas terbakar banyak dipandang sebagai kegiatan yang terpisah dari manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan, padahal kegiatan rehabilitasi dapat mengurangi terjadinya kebakaran kembali. Rehabilitasi merupakan upaya manusia untuk mempercepat proses suksesi sehingga proses penutupan lahan dapat berlangsung segera. Meskipun proses suksesi dapat berlangsung secara alami tetapi hal ini akan berlangsung dalam waktu yang lama. Oleh karena itu rehabilitasi seharusnya merupakan bagian dari sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang harus dilakukan secepat mungkin setelah terjadinya kebakaran sehingga dengan rehabilitasi diharapkan akan terjadi perbaikan kualitas lahan, yaitu dari areal kosong menjadi areal bervegetasi, atau dari areal yang miskin vegetasi akan menjadi areal yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Kebijakan pengendalian kebakaran hutan sebaiknya diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya hotspot dibandingkan dengan kebijakan saat ini

43 Adinugroho, W.C., Suryadiputra, I.N.N., Saharjo, B.H., et.al., Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. (Wetlands International: Bogor, 2005) hlm.68

yang lebih cenderung pada upaya pemadaman kebakaran hutan. Perubahan paradigma pengendalian kebakaran hutan ini perlu didukung dengan sosialisasi, dukungan anggaran, sumberdaya manusia, dan peralatan. Peran pemantauan satelit dan pengawasan timbulnya hotspot oleh masyarakat akan menentukan efektivitas pengendalian hotspot yang terjadi44. Sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok kegiatan, antara lain: kegiatan pra kebakaran, saat terjadi kebakaran dan pasca kebakaran. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli api. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai kebakaran serta upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran. Harapan dari kegiatan ini adalah masyarakat memiliki pengetahuan terkait kebakaran serta upaya-upaya pencegahan dan terbentuk kesiapsiagaan masyarakat ketika terjadi kebakaran. Selain itu diharapkan masyarakat juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran45.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, selain itu tugas yang dijalankan sesuai dengan pasal 395 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 antara lain46:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

44 Ibid, Cahyono, S.A. hlm.103-111

45 Faiida, I.L.R., et.al., Buku Panduan Mitigasi dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM): Jakarta, 2018) hlm.1

46 Peraturan Menteri Kehutanan (permenhut) Nomor 15 Tahun 2021, diambil dari [https://drive.ppidklhk.com/files/1/2022/Monev/P.15%202021%20tentang%20Organisa](https://drive.ppidklhk.com/files/1/2022/Monev/P.15%202021%20tentang%20Organisasi%20dan%20Tata%20Kerja%20KLHK.pdf) [si%20dan%20Tata%20Kerja%20KLHK.pdf](https://drive.ppidklhk.com/files/1/2022/Monev/P.15%202021%20tentang%20Organisasi%20dan%20Tata%20Kerja%20KLHK.pdf) diakses pada 1 maret 2023

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
2. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
5. Supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah; dan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

# BAB III

**PROSES IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN SITUBONDO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999**

Kebakaran hutan dan lahan ini merupakan permasalahan yang sangat penting karena berdampak pada hilangnya ekosistem dari hutan dan potensi lain yang terkandung di dalamnya temasuk keanekaragaman hayati. Dampak kebakaran hutan dan lahan yang menonjol adalah terjadinya kabut asap yang menganggu kesehatan dan sistem transpotasi darat, laut dan udara. Intensitas gangguan terhadap hutan ini, semakin meningkat dari waktu ke waktu baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia. Kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo di setiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif atau naik turun. Hasil analisis dan pengambilan data menunjukkan pada periode tahun 2015-

2022 terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 86 kejadian. Kasus kebakaran hutan dan lahan tertinggi pada tahun 2019 lalu disusul pada tahun 2022. Frekuensi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, Puncak kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 31 kejadian. Kasus kebakaran hutan terakhir di kabupaten situbondo terjadi pada tahun 2022 di daerah balung kecamatan kendit. kebakaran seluas 2,5 Ha hutan jati di Desa Balung, Kecamatan Kendit pada petak 50 K Kelas hutan TKTBP, RPH Kendit, BKPH Panarukan akibat dari cuaca yang cukup panas karena kemarau panjang dan dugaan sementara sumber api yang membakar hutan jati di wilayah RPH Kendit ini, berasal dari pembakaran daun tebu yang ditebang47.

Upaya penanggulangan kebakaran hutan yang telah dilakukan antara lain mendatangi lokasi tempat kejadian, pendataan dan dokumentasi, koordinasi dengan forkopimka kendit, membantu memadamkan api pakai dahan kayu dan

47 Puriono, diambil dari https://[www.liputan6.com/amp/5061021/kebakaran-hutan-di-](http://www.liputan6.com/amp/5061021/kebakaran-hutan-di-) situbondo-meluas-25-hektare-hutan-jati-dilalap-api diakses pada 10 Januari 2023

33

peralatan seadanya. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain melaporkan kejadian ke BNPB Jakarta, BNPB Jawa Timur, dan instansi terkait48.

Peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diatur dalam UU No. 5 tahun 1990, UU No.5 tahun 1994, UU No. 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No. 4

tahun 2001, PP Menteri LHK No. 10 Tahun 2010, Inpres No. 11 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Langkah-langkah dan upaya-upaya dalam rangka penanggulangan kebakaran kebakaran hutan dan lahan terdiri dari:

1. Pemasyarakatan tindakan pencegahan dan penanggulangan (pemadaman) melalui kegiatan penyuluhan yang terkoordinasi seperti penggunaan media cetak, elektronik dan sebagainya;
2. Pelarangan kegiatan pembakaran dan pemasyarakatan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB);
3. Peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun perusahaan;
4. Pemenuhan dan pengadaan peralatan pemadaman kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan;
5. Melakukan kerjasama teknik dengan negara-negara donor;
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan;
7. Menindak tegas setiap pelanggar hukum/peraturan yang telah ditetapkan;
8. Peningkatan upaya penegakan hukum.

Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan asap menyakitkan bagi makhluk hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 dan PP No. 4 tahun 2001, kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab setiap warga, dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat. Tanggung jawab pengendelian hutan meliputi:

1. Setiap orang berkewajiban mencegah kebakaran hutan dan lahan;
2. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan di hutan Negara;
3. Penanggung jawab usaha (perorangan, badan usaha milik swasta/ Negara/daerah, koperasi, yayasan) bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran di lokasi usahanya;
4. Pengendalian hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang hak.

Meskipun kebijakan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah banyak tersedia dan rinci, tetapi dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan tersebut masih kurang memadai dan bersifat sektoral. Tindakan hukum bagi pelaku penyebab kebakaran yang menganut sanksi dan denda maksimal memperlemah kekuatan untuk membuat jera pelaku penyebab kebakaran, karena dengan sistem ini memungkinkan pelaku mendapat hukuman yang lebih ringan dari yang seharusnya ia terima bahkan mungkin dapat lepas dari tindakan hukum. Tindakan hukum bagi para penyebab kebakaran secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dalam pasal 78 ayat 3, 4 dan 1149, yaitu:

1. Sengaja membakar hutan:

Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah.

1. Kelalaian sehingga menyebabkan kebakaran hutan:

Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 milyar rupiah.

1. Membuang benda yang dapat menyebabkan kebakaran hutan:

Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah. Kebijakan kebakaran hutan diatur didalam beberapa peraturan yang berlaku.

Implementasi kebijakan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo mengikuti peraturan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Intruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati (Kepala Daerah). Kebijakan kebakaran hutan sesuai beberapa peraturan yang berlaku disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1** Kebijakan kebakaran hutan & lahan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Peraturan** | **Nomor Peraturan** | **Isi** |
| Undang-Undang | UU No.5 Tahun 1967 | Ketentuan-ketentuan pokok  kehutanan |
| UU No.5 Tahun 1990 | Konservasi sumber daya alam  hayati dan ekosistemnya |
| UU No.5 Tahun 1994 | Ratifikasi dari konvensi PBB mengenai keanekaragaman  hayati |
| UU No.6 Tahun 1994 | Ratifikasi dari konvensi PBB  mengenai perubahan iklim |
| UU No.23 Tahun 1997 | Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| UU No.41 Tahun 1999 | Pokok-pokok Kehutanan (pengganti UU No.5 Tahun  1967) |
| Peraturan Pemerintah | PP No.28 Tahun 1985 | Perlindungan Hutan |
| PP No.4 Tahun 2001 | Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau  lahan |
| Instruksi Presiden | Inpres No.11 Tahun  2015 | Peningkatan pengendalian  kebakaran hutan dan lahan |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  dan Kehutanan | Permen No. P.32/MenLHK/Setjen/  Kum.1/3/2016 | Pengendalian kebakaran hutan dan lahan |
| Peraturan  Gubernur | Pergub No.1 Tahun  2014 | Sistem pengendalian  kebakaran hutan dan lahan |
| Peraturan Bupati Situbondo | Perbub No.21 Tahun 2018 | Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pemadam kebakaran pada satuan polisi pamong praja  kabupaten situbondo |

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 pada dasarnya mengatur tentang pembagian wewenang dan tanggungjawab dalam upaya penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan. Pembentukan wilayah pengelelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Pasal 17, 18, dan 19. Penyerahan

kewenangan dalam rangka penyelenggaraan hutan, sebagian kewenangannya diberikan kepada pemerintah, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 199950.

Pengendalian kebakaran hutan adalah aktivitas untuk melindungi hutan dari kebakaran liar dan penggunaan api untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan hutan. Pengendalian kebakaran hutan terdiri tiga komponen kegiatan yaitu:

1. Mencegah terjadinya kebakaran hutan.
2. Memadamkan kebakaran hutan dengan segera sewaktu api masih kecil.
3. Penggunaan api hanya untuk tujuan-tujuan tertentu dalam skala terbatas.

Agar pengendalian kebakaran hutan dapat berhasil dengan baik maka sebelum dilaksanakan perlu disusun rencana pengendalian yang menyeluruh. Rencana ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penggunaan api secara terkendali di dalam hutan dan di daerah sekitarnya. Rencana pengendalian kebakaran hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pengelolaan (manajemen) hutan.

Kebakaran merupakan kejadian alam yang tidak dapat diprediksi, sehingga membutuhkan respon time yang cepat menanggulangi kebakaran hutan. Tapi upaya pencegahan harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan secara terus menerus. Manajemen kebakaran berbasiskan masyarakat akan lebih baik diarahkan untuk kegiatan pencegahan daripada usaha pemadaman kebakaran. Pencegahan meliputi pekerjaan/kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar tidak terjadi kebakaran. Pencegahan kebakaran hutan merupakan salah satu komponen pengendalian kebakaran hutan yang mencakup semua cara untuk mengurangi atau meminimumkan jumlah kejadian kebakaran liar. Pencegahan kebakaran hutan bukan bertujuan untuk menghilangkan semua kejadian kebakaran liar. Menghilangkan semua kejadian kebakaran hutan merupakan suatu hal yang sangat sulit dan tidak mungkin dilakukan. Banyak kejadian kebakaran yang sumber apinya tidak diketahui atau berasal dari sumber yang berada di luar jangkauan kemampuan pengendalian suatu organisasi pengendalian kebakaran

50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

hutan. Adapun strategi yang dapat dijadikan acuan dalam usaha pencegahan terjadinya kebakaran meliputi pendekatan sistem informasi kebakaran, pendekatan sosial ekonomi masyarakat, dan pendekatan pengelolaan hutan dan lahan.

Keberhasilan kegiatan pencegahan dan penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan sangat tergantung kepada keberhasilan membawa serta masyarakat lokal mulai dari emosi, perasaan dan semangat untuk mempertahankan kelestarian hutan dan memerlukan pendekatan pengelolaan hutan dan lahan yang memahami segi manusiawi. Tiga asumsi pokok yang mendasari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu:

* 1. Rasio jumlah petugas yang menguasai wilayah hutan dengan luas wilayah yang harus dikuasainya sangat rendah, sehingga apabila masyarakat lokal tidak ikut berpartisipasi aktif dalam penjagaan keamanan hutan maka kelestarian hutan akan terancam;
  2. Apabila masyarakat lokal memiliki kesadaran akan fungsi hutan serta tidak ada faktor lain yang memaksanya, maka harapan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif untuk menjaga keamanan hutan dari bahaya kebakaran maupun jenis kerusakan lainnya akan dapat terlaksana;
  3. Masyarakat lokal adalah salah satu unsur pembentuk sumber api yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Masyarakat mau menyatu dan bisa terangsang, tergerak untuk menjaga hutan dari kerusakan apabila:

1. Ia merasa dirinya berarti dalam proses pengelolaan hutan dan lahan;
2. Terdapat insentif;
3. Emosinya tergetar oleh harga diri yang tumbuh akibat penyertaan dirinya dalam pengelolaan hutan dan lahan tersebut;
4. Semangatnya terbangkitkan untuk sesuatu yang ia hasrati dan sadari sebagai hal yang patut diperjuangkan yaitu menjaga hutan dan lahan dari kerusakan.

Masyarakat lokal bukan sasaran benda mati, ia memiliki rasa, emosi dan semangat, oleh karenanya keseluruhan jiwa dan raganya perlu dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Pelibatan dirinya sebagai subyek, manusia terhormat, sebagai

partisipan aktif yang berharga diri akan mendorong keberhasilan dalam menjaga kawasan hutan dan lahan dari kerusakan.

Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, minimal kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan kembali yang telah merugikan banyak pihak. Bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat pun harus berinisiatif dan ikut bertindak dalam hal pencegahan antara lain:

1. Hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran.
2. Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan.
3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran.
4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran.
5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. Perhatikan juga tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya.
6. Ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Untuk itu, perlu memberikan peringatan agar tidak sembarangan membakar sampah atau rumput di sekitar hutan, apalagi saat angin kencang di musim kemarau.
7. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
8. Membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu tanahnya jadi lembap dan basah sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau.
9. Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran
10. Menyiapkan peralatan untuk memadamkan api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan ataupun lahan.
11. Melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau.
12. Deteksi kebakaran sejak awal dengan mendirikan menara pengawas ataupun pos jaga lengkap dengan teropong dan alat komunikasi. Juga, menyimak informasi data satelit/cuaca di area hutan sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran besar.
13. Menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran untuk mempermudah mencari air jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
14. Penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka akan bahaya kebakaran hutan/lahan yang berdampak buruk bagi banyak pihak.
15. Menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum menyebar luas.
16. Siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.
17. Pemetaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan supaya semua pihak lebih fokus untuk melakukan pengawasan.

# BAB IV

**PENYELESAIAN KENDALA SELAMA PROSES IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN SITUBONDO**

Koordinasi antar Lembaga dalam kasus kebakaran hutan diperlukan untuk menanggulangi secara bersama kejadian kebakaran hutan. Koordinasi dilakukan untuk mengawali proses terhadap suatu objek kejadian, lalu dilakukan komunikasi pembuatan keputusan. Upaya peningkatan penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan disampaikan oleh presiden melalui Inpres Nomor 11 Tahun 2015 kepada seluruh pimpinan terkait mulai dari Menteri Koordinator, Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polisi RI, Gubernur, hingga Bupati dan Walikota51.

Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 antara lain adalah:

1. Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui kegiatan:
   1. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
   2. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
   3. Penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan.
2. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4. Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Instruksi khusus dalam Inpres Nomor 11 Tahun 2015 antara lain kepada52:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:
   1. Mengoordinasikan seluruh instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

51 Inpres Nomor 11 Tahun 2015.

52 Ibid. no.49 hal 2-9

41

* 1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  2. Melaporkan kepada Pre siden atas pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara intensif dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
   1. Membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
   2. Membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengoordinasikan instansi yang berada di bawah koordinasinya sekaligus menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
   1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
   2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengendalian kebakaran hutan (Manggala Agni);
   3. Mewajibkan kepada pemegang izin usaha di bidang kehutanan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan serta melaksanakan pengendalian kebakaran hutan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai standar yang ditentukan;
   4. Memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha di bidang kehutanan yang tidak memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan, serta tidak melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya;
   5. Meningkatkan koordinasi dalam upaya pemulihan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan;
   6. Meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerja sama regional dan internasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
   7. Meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Polisi Kehutanan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
3. Menteri Pertanian:
   1. Menyusunpedoman yang terkait dengan pengendalian kebakaran lahan pertanian;
   2. Meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pertanian dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pertanian;
   3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran lahan pertanian;
   4. Memfasilitasi penerapan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan pertanian
4. Menteri Kesehatan:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan.

1. Menteri Dalam Negeri:

Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Gubernur atau Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional:

Melakukan identifikasi penguasaan dan pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat terhadap kesesuaian dengan arahan tata ruang.

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
   1. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan secara terpadu;
   2. Memberikan dukungan pendampingan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada bencana tingkat kabupaten atau provinsi sesuai dengan kondisi atau kebutuhan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan;
   3. Melaksanakan fungsi komando untuk pengerahan sumber daya dan pengoordinasian penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika:
   1. Menyediakan informasi sebaran asap, hotspot, kualitas udara, prakiraan potensi kebakaran hutan dan lahan, cuaca, musim, dan informasi khusus lain yang terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
   2. Menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait secara berkala atau sewaktu-waktu
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan:
   1. Menyiapkan dan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk dapat memberikan bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
   2. Menyiapkan dan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan bantuan terhadap tugas-tugas pemerintah di daerah dalam penanggulangan/pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk tindakan evakuasi apabila diperlukan;
   3. Menyiapkan dan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk dapat membantu Kepolisian dalam tugas-tugas pengamanan penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
   1. Meningkatkan langkah-langkah pre-emtif dan preventif dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta represif dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan;
   2. Meningkatkan koordinasi dalam proses penyidikan perkara kebakaran hutan dan lahan yang ditangani Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Para Gubernur:
   1. Menyusun Peraturan Gubernur mengenai sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
   2. Mengoptimalkanperan dan fungsi Badan PenanggulanganBencana Daerah sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
   3. Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
   4. Memfasilitasi hubungan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
   5. Melaporkanhasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
   6. Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya;
   7. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Para Bupati/Walikota:
   1. Menyusun Peraturan Bupati/Walikota mengenai sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
   2. Mengoptimalkanperan dan fungsi Badan PenanggulanganBencana Daerah sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
   3. Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerj anya;
   4. Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
   5. Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya;
   6. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya;
   7. Melaporkanhasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Gubernur.

Kasus ataupun kejadian kebakaran hutan di suatu daerah khususnya kabupaten/kota, maka secara perspektif umum di kalangan pemerintah daerah sudah menjadi tanggung jawab SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengurusi kehutanan, dalam hal ini adalah perhutani. Namun, pihak dari perhutani setiap daerah harus bekerja sama, dan berkoordinasi dengan SKPD lainnya seperti BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Damkar (Pemadam Kebakaran) dalam menanggulangi kasus kebakaran hutan yang terjadi, dikarenakan tidak hanya kasus kebakaran yang di atasi melainkan penyelamatan terhadap makhluk hidup, utamanya manusia53.

Pengelolaan kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Situbondo dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso dan Situbondo yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2003. Perum Perhutani KPH Bondowoso dan Situbondo termasuk ke dalam salah satu unit kerja pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

* 1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
  2. Sebelah selatan berbatasan dengan KPH Jember.
  3. Sebelah timur berbatasan dengan KPH Banyuwangi Utara dan KPH Banyuwangi Barat.
  4. Sebelah barat berbatasan dengan KPH Probolinggo.

Perum perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bondowoso Situbondo merupakan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 200354.

Kendala selama proses penanggulan kebakaran hutan yang sering terjadi di kabupaten situbondo adalah akses masuk ke wilayah hutan, khususnya kendaraan berat atau mobil dinas kebakaran. Apabila dalam kasus kebakaran hutan dan lahan mengalami suatu kendala, maka penyelesaian utama selama proses penanggulan kebakaran hutan di TKP (tempat kejadian perkara) diantaranya adalah55:

1. Sterilisasi posisi aman dari warga.

53 Agus Prayugo., Kepala Damkar Kabupaten Situbondo. Wawancara. 8 Juni 2023

54 Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2003

55 Ibid. Wawancara Zainul Arifin

1. Melihat dan menyesuaikan kobaran api (disesuaikan dengan keadaan).
2. Penyelamatan manusia dan hewan.
3. Koordinasi dengan sumber daya manusia atau instansi terkait seperti Anggota Polsek, Anggota Koramil, Petugas Perhutani, Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten, Anggota Tagana Dinas Sosial Kabupaten, Anggota Pemadam Kebakaran, Perangkat Desa, dan Warga Setempat.

Upaya pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang sering dilakukan adalah kegiatan pemadaman kebakaran hutan yang terjadi. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara terintegrasi dengan dari Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Situbondo yang dibantu instansi lainnya seperti Anggota Perhutani, BPBD, Polsek, Koramil, dan masyarakat setempat. Namun upaya tersebut kadangkala tidak optimal hasilnya terutama di lahan gambut yang sulit diakses oleh mobil pemadam kebakaran, sehingga diambil tindakan untuk menunggu kobaran api sampai ke pinggir karena dapat dipastikan kobaran api di area tengah yang terbakar sudah mati. Selain itu, selang air milik tim pemadam kebakaran hanya memiliki panjang maksimal 200 meter, dan hal ini yang menyulitkan proses penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di area-area yang sulit terjangkau56. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan akan efektif apabila diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi luas kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan merupakan kejadian alam yang tidak dapat diprediksi tetapi dapat dicegah. Kebijakan pengendalian kebakaran hutan sebaiknya diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya hotspot dibandingkan dengan kebijakan saat ini yang lebih cenderung pada upaya pemadaman kebakaran hutan. Perubahan paradigma pengendalian kebakaran hutan ini perlu didukung dengan sosialisasi, dukungan anggaran, sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan. Pengendalian kebakaran hutan secara umum dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut seperti, pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran yang dilakukan di mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kesatuan pengelolaan hutan. Upaya pencegahan kebakaran dilakukan melalui beberapa cara seperti:

56 Ibid. Wawancara Agus Prayugo

1. Kampanye penyadaran masyarakat akan bahaya terjadinya kebakaran hutan dan lahan
2. Peningkatan teknologi pencegahannya, seperti peringatan dan pencegahan kebakaran hutan, seperti halnya pembuatan embung, green belt, menara pengawas, dan lainnya
3. Pemantapan perangkat lunak (software) sebagai pengukur berapa besar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Upaya pemadaman kebakaran hutan dilakukan melalui peningkatan teknologi pemadaman, operasi pemadaman (pemadaman dini dan pemadaman lanjut), serta penyelamatan dan evakuasi57. Sedangkan upaya penanganan pasca kebakaran dilakukan dengan kegiatan monitoring, evaluasi, dan inventarisasi hutan atau lahan bekas terjadinya kebakaran, sosialisasi dan penegakkan hukum, dan rehabilitiasi58.

Prosedur pemadam kebakaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur dinas pemadam kebakaran dan penyelematan provinsi dan kabupaten/kota. Bab II pasal 7 berisi tentang Dinas damkar dan penyelamatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertugas59:

1. Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
2. Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasaran pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
4. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
5. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
6. Melakukan investigasi kejadian kebakaran;

57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

58 Puriono., Pusdalog Satdata & Informasi BPBD Kabupaten Situbondo. Wawancara. 9 Juni 2023.

59 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 16 Tahun 2020.

1. Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
2. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
4. Melakukan sosialisasi pencegehan dan penanggulangan kebakaran;
5. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
6. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
7. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegritas; dan
8. Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

Kejadian kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo melalui wawancara bersama Kepala Damkar Kabupaten Situbondo yaitu Agus Prayugo, menunjukkan bahwa manajemen kebakaran di Kabupaten Situbondo lebih difokuskan pada aspek pemadaman daripada aspek pencegahan, hal demikian tersirat dari:

1. Respon waktu atau call center response adalah 15 menit untuk jarak 7-10 km.
2. Proses melakukan sterilisasi posisi aman bagi warga jika terjadi kebakaran hutan yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat.
3. Proses menunggu api di pinggir area jika mobil pemadam kebakaran tidak dapat masuk lebih jauh ke dalam hutan, sehingga menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan ketika itu.
4. Fokus terhadap proses penyelematan manusia dan hewan sekitar ketika terjadi kebakaran

Kelemahan dan kendala penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah pendekatan sektoral (strategi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tidak sistematis, komprehensif dan terintegrasi), kebijakan yang tidak sinkron, inkonsisten, mekanisme dan prosedur tidak transparan dan terkoordinir,

kegiatan atau program tidak terkoordinir dan penegakan hukum lemah60. Penguatan kelembagaan Karhutla diperlukan kelembagaan yang mempunyai otoritas tingkat provinsi dan meningkatkan efektivitas program kerja dengan mengubah pendekatan sektoral menjadi fungsional dengan melibatkan publik yakni pengusaha dan tokoh masyarakat.

60 Simorangkir, D., & Sumantri. (2002). A review of legal, regulatory and institutional aspects of forest and land fires in Indonesia. Bogor: Project FireFight South East Asia.

# BAB V KESIMPULAN & SARAN

## Kesimpulan

Hasil penelitian tentang Analisis Implementasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

* + 1. Implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kabupaten situbondo sesuai dengan perspektif undang-undang nomor 41 tahun 1999 dimana telah dilakukan upaya mendatangi lokasi tempat kejadian, pendataan, dokumentasi, koordinasi dengan forkopimka kendit, anggota polsek, anggota koramil, petugas perhutani, anggota pusdalops bpbd kabupaten, anggota tagana dinas sosial kabupaten, anggota pemadam kebakaran, perangkat desa, dan warga setempat membantu memadamkan api pakai dahan kayu dan peralatan seadanya. Langkah- langkah yang telah dilakukan antara lain melaporkan kejadian ke BNPB Jakarta, BNPB Jawa Timur, dan instansi terkait.
    2. Penyelesaian kendala proses implementasi penanggulan hutan sesuai dengan perpektif undang-undang nomor 41 tahun 1999 antara lain sterilisasi posisi aman dari warga, melihat dan menyesuaikan kobaran api (disesuaikan dengan keadaan), penyelamatan manusia dan hewan, dan koordinasi dengan pihak setempat.

## Saran

Saran yang diajukan berdasarkan penelitian ini antara lain:

* + 1. Bukan hanya aktor pemerintah yang dilibatkan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tapi masyarakat sipil, akademisi, dan pengusaha.
    2. Mekanisme koordinasi yang efektif masih perlu dikaji mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat desa.

# DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembertantasan Perusakan Hutan

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)

Peraturan Menteri Kehutanan No. 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur dinas pemadam kebakaran dan penyelematan provinsi dan kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja KLHK

## Buku

Adinugroho, W.C., Suryadiputra, I.N.N., Saharjo, B.H., et.al., Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. (Wetlands International: Bogor, 2005) hlm.68

Arifin, A., Hutan dan Kehutanan, (Kanisius: Yogyakarta, 2010) hlm.11

Banyu, P.A.A., Yani, Y.M, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. (Rosda, 2005) hlm 132.

Faiida, I.L.R., et.al., Buku Panduan Mitigasi dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM): Jakarta, 2018) hlm.1

Jackson, Robert., George, Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional,

(Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009) hlm. 55.

Kementrian Kehutanan, Statistika Kementrian Kehutanan Tahun 2013, (Jakarta, 2014) hlm.1

Mahardika, I.M.S., Metodologi Penelitian (Unesa University Pess: Surabaya, 2015).

Robert, Collier (2013). Riches Within Your Reach, p.188, Distributed by Simon and Schuster

Simorangkir, D., & Sumantri. (2002). A review of legal, regulatory and institutional aspects of forest and land fires in Indonesia. Bogor: Project FireFight South East Asia.

Usup, I., Buku Panduan Sistem Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Berbasis Masyarakat Untuk Kawasan Hutan dan Lahan Gambut Tropis di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. (Universitas Palangkaraya, 2015) hlm.2

Waluyo, J., et.al., Buku Panduan: Tata Cara Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Berbasis Desa. (Kemitraan Patnership: Jakarta, 2020) hlm.32

Yani, A., Suryani, A., Saharjo, B.H., et.al., Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Pontianak, 2020) hlm.3

Tacconi, L., Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan. (Bogor: CIFOR Occasional Paper No.38 (i), 2003)

## Jurnal

Arisman., Analisis Tren Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Periode Tahun 2015-2019. Jurnal sains teknologi & lingkungan (Vol.6 No.1, 2020) hlm.1 Budiningsih, K. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal analisis kebijakan kehutanan.

(2017), Vol.14(2) Hal:165-186

Cahyono, S.A., et.al. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di indonesia dan implikasi kebijakannya. Jurnal Sylva Lestari (Vol.3 No.1, 2015) hlm.103

Dhall, A., Dhasade, A., Nalwade, A., et.al. A survey on systematic approaches in managing forest fires. Applied Geography. (2020), Vol.121 pp:1-19 <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102266>

D’Evelyn, Savannah M., Jung, J., Alvarado, E., et.al. Wildfre, Smoke Exposure, Human Health, and Environmental Justice Need to be Integrated into Forest Restoration and Management. Current Enviromental Health Reports. (2022) Vol.9 pp:366-385 DOI: [https://doi.org/10.1007/s40572-](https://doi.org/10.1007/s40572-022-00355-7) [022-00355-7](https://doi.org/10.1007/s40572-022-00355-7)

Fachrie, M. Indonesia’s forest fire and haze pollution: an analysis of human security. Malaysian journal of international relations. (2020), Vol.8 pp:104-117 doi: doi.org/10.22452/mjir.vol8no1.7

Kevin, R., Security Policy: High-impact Strategies - What You Need to Know: Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors. (Brisbane: Emereo Publishing, 2012) hal 141.

Saputra, A.N., Iqbal, M., Adyatma, S. Pemetaan kebakaran hutan dan lahan di kota banjarbaru. Jurnal pendidikan geografi. (2023), Vol.10 No.1 doi: <http://dx.doi.org/10.20527/jpg.v10i1.12424>

Sarah Brylinsky dan Susan Allen-Gil, Addressing Global Environmental Security Through Innovative Educational Curricula, (Kharkiv: Springer, 2008) hlm.100.

Shafitri, L.D., Prasetyo, Y., Hani’ah. Analisis deforestasi hutan di provinsi riau dengan metode polarimetrik dalam pengindraan jauh. Jurnal Geodesi, Vol.7 No.1, 2018, hlm. 212.

Tuhulele, Popi., Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim, (Vol.3 No.2, Desember 2014) hlm. 26.

Umasangaji, S., Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah. Vol.15 No.2, 2017, hlm.85-164

Utami, S., Armawi, A., Hadmoko, D.S. Implikasi peran pemuda dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan terhadap ketahanan wilayah (studi pada pemuda komunitas elite armada rimba sriwijaya, kabupaten ogan ilir, sumatra selatan). Jurnal ketahanan nasional. 2018, Vol.24 (3):306-325 <http://dx.doi.org/10.22146/jkn.38349>

Yani, A., Suryani, A., Saharjo, B.H., et.al., Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Pontianak, 2020) hlm.3

## Lain-lain

Agus Prayugo., Kepala Damkar Kabupaten Situbondo. Wawancara. 8 Juni 2023 BNPB Nasional, diambil dari <https://gis.bnpb.go.id/> diakses pada 02 maret 2023 BPBD Kabupaten Situbondo, Sumber: Foto Pribadi. 8 Juni 2023

BPS Kab. Situbondo, <https://situbondokab.bps.go.id/> Diakses 01 Maret 2023 Diakses dari [http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeche](http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeche%20s/2013/06/02/helen-clark-speech-)

[s/2013/06/02/helen-clark-speech-](http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeche%20s/2013/06/02/helen-clark-speech-)[to-symposium-on-humsn-security-attic](http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/06/02/helen-clark-speech-to-symposium-on-humsn-security-at-ticad-v.html) [ad-v.html.](http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/06/02/helen-clark-speech-to-symposium-on-humsn-security-at-ticad-v.html) Diakses 26 Februari 2023

Hutan Adat, diambil dari [https://jurnalbumi.com/hutan-adat/,](https://jurnalbumi.com/hutan-adat/) diakses pada 15 April 2023.

Keamanan Lingkungan Hidup dengan Memerangi Akarnya, diambil dari”

(https://[www.academia.edu/4845533/Keamanan\_Lingkungan\_Hidup\_seb](http://www.academia.edu/4845533/Keamanan_Lingkungan_Hidup_sebagai_Antisipasi_Ancama)

[agai\_Antisipasi\_Ancama](http://www.academia.edu/4845533/Keamanan_Lingkungan_Hidup_sebagai_Antisipasi_Ancama) n\_Global\_Kerusakan\_Lingkungan ), diakses pada tanggal 16 April 2023.

Perum (perusahaan umum) Perhutani KPH Bondowoso dan Situbondo, diambil dari <https://www.perhutani.co.id/> diakses pada 01 maret 2023

Puriono, diambil dari [https://www.liputan6.com/amp/5061021/kebakaran-](https://www.liputan6.com/amp/5061021/kebakaran-hutan-di-situbondo-meluas-25-hektare-hutan-jati-dilalap-api%20diakses%2010%20Januari%202023) [hutan-di-situbondo-meluas-25-hektare-hutan-jati-dilalap-api diakses 10](https://www.liputan6.com/amp/5061021/kebakaran-hutan-di-situbondo-meluas-25-hektare-hutan-jati-dilalap-api%20diakses%2010%20Januari%202023)

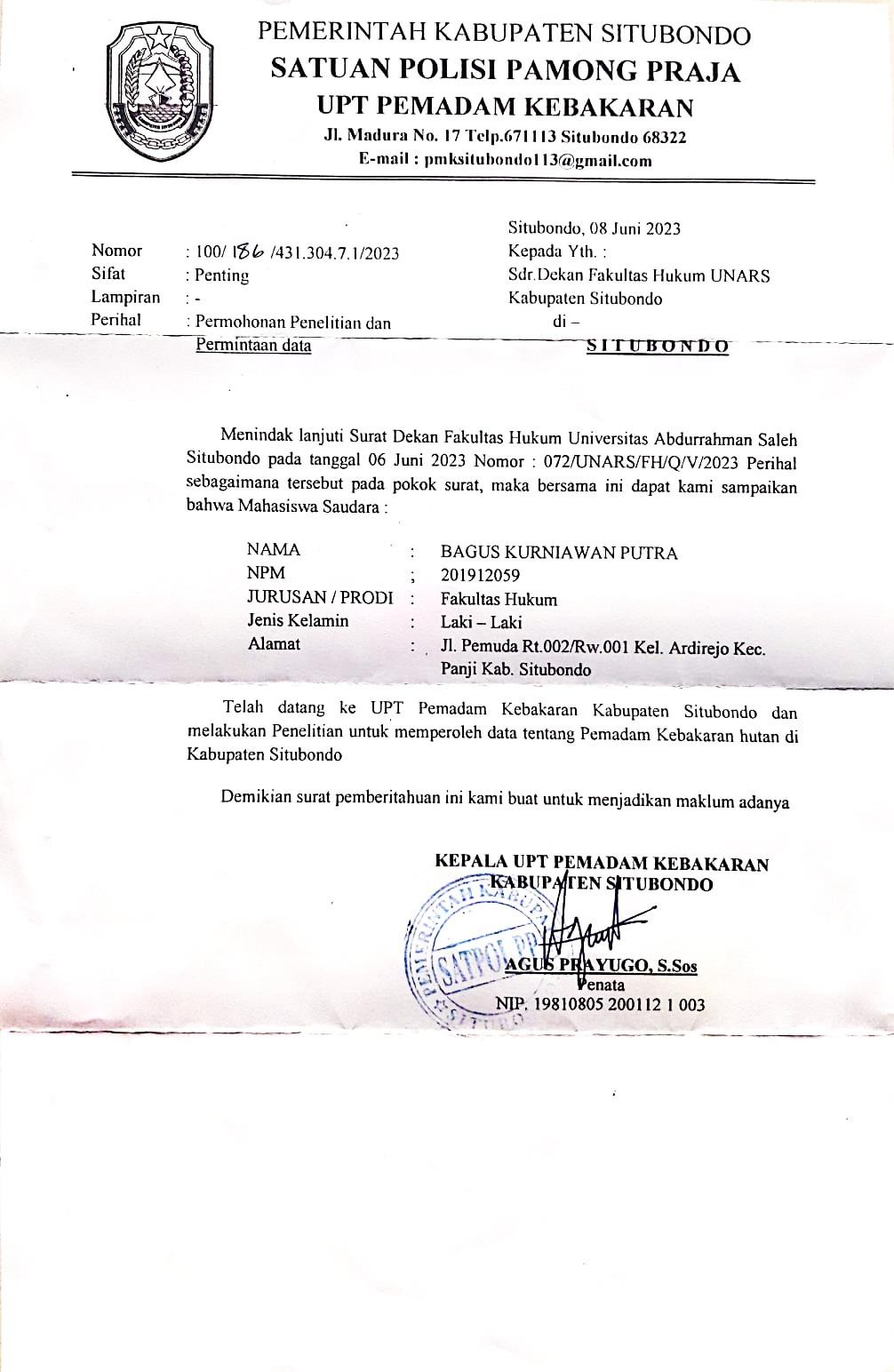
[Januari 2023](https://www.liputan6.com/amp/5061021/kebakaran-hutan-di-situbondo-meluas-25-hektare-hutan-jati-dilalap-api%20diakses%2010%20Januari%202023)

Puriono., Pusdalog Satdata & Informasi BPBD Kabupaten Situbondo.

Wawancara. 9 Juni 2023.

Zainul Arifin, Kepala BPBD Kabupaten Situbondo. Wawancara. 9 Juni 2023

# LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Surat balasan penelitian

57

**Lampiran 2.** Hasil wawancara

Hasil Wawancara Narasumber Pemadam Kebakaran

Narasumber: Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Situbondo Tanggal: 6 Juni 2023

## Bagaimana sudut pandang perpektif Anda dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Situbondo? Apa penyebab kebakaran hutan dan lahan di RPH Kendit, Panarukan pada tahun 2022?

Sebenarnya kebakaran adalah kejadian alam yang tidak dapat dan sulit kita prediksi, sehingga membutuhkan respon time yang cepat untuk menanggulangi kebakaran hutan. Tapi upaya pencegahan harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan secara terus menerus. Pencegahan bisa meliputi pekerjaan/kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar tidak terjadi kebakaran.

Dugaan awal yaitu cuaca panas karena saat itu musim kemarau panjang, sehingga kemungkinan besar sumber api berasal dari sisa-sisa pembakaran daun tebu yang ditebang oleh masyarakat sekitar atau bisa saya katakan masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

## Apakah proses implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan?

Jika kebijakan penanggulangan kebakaran hutan pada dasarnya kita memang menyesuaikan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tersebut, tetapi kelanjutannya kita juga menyesuaikan dengan beberapa peraturan-peraturan mulai dari presiden, menteri, gubernur, dan bupati. Karena tugas kita fleksibel, secara dasar kita mengikuti undang-undang kehutanan dan kita juga mengikuti peraturan-peraturan lainnya. Salah satu contoh dari undang-undang nomor 41 tahun 1999 adalah tindakan pencegahan dan penanggulangan (pemadaman) melalui penyuluhan, menindak tegas pelanggar hukum/peraturan yang telah ditentukan, lalu upaya-upaya penegakan hukum.

Tugas kita sebagai tim pemadam kebakaran yaitu melakukan proses pemadaman kebakaran sesuai dengan aturan dari Mendagri (menteri dalam negeri) nomor 16 tahun 2020 yang isinya mirip atau bahkan sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 1999 antara lain melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran atau area yang tidak terbakar kita lakukan evakuasi, dan melakukan investigasi kejadian kebakaran, kemudian banyak lagi poin-poin dalam peraturan tersebut.

## Bagaimana penyelesaian kendala selama proses implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan?

Upaya pemadaman kebakaran hutan antara lain peningkatan teknologi pemadaman, operasi pemadaman (pemadaman dini dan pemadaman lanjut), penyelamatan, dan evakuasi. Upaya tersebut ada di undang-undang nomor 41

tahun 1999, karena yang menjadi dasar dalam proses pemadaman kebakaran hutan, penyelematan, dan evakuasi adalah undang-undang terkait. Selain itu, ada peraturan-peraturan dari kepala daerah dalam proses-proses pencegahan dan penanggulan kebakaran hutan, hanya saja kita tetap menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi ketika ada kebakaran hutan dan lahan.

Kasus ataupun kejadian kebakaran hutan di suatu daerah khususnya kabupaten/kota, maka secara perspektif umum di kalangan pemerintah daerah sudah menjadi tanggung jawab SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengurusi kehutanan, dalam hal ini adalah perhutani. Namun, pihak dari perhutani setiap daerah harus bekerja sama, dan berkoordinasi dengan SKPD lainnya seperti BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Damkar (Pemadam Kebakaran) dalam menanggulangi kasus kebakaran hutan yang terjadi, dikarenakan tidak hanya kasus kebakaran yang di atasi melainkan penyelamatan terhadap makhluk hidup, utamanya manusia.

Upaya pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang sering dilakukan adalah kegiatan pemadaman kebakaran hutan. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara terintegrasi dengan dan dari Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Situbondo yang dibantu instansi lainnya seperti Anggota Perhutani, BPBD, Polsek, Koramil, dan masyarakat setempat. Namun upaya tersebut kadangkala tidak optimal hasilnya terutama di lahan gambut yang sulit diakses oleh mobil pemadam kebakaran, sehingga diambil tindakan untuk menunggu kobaran api sampai ke pinggir karena dapat dipastikan kobaran api di area tengah yang terbakar sudah mati. Selain itu, selang air milik tim pemadam kebakaran hanya memiliki panjang maksimal 200 meter, dan hal ini yang menyulitkan proses penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di area-area yang sulit terjangkau. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan akan efektif apabila diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi luas kebakaran hutan dan lahan.

## Apa saja kelemahan serta kekurangan dalam mencegah dan menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Situbondo?

Kelemahan dan kendala penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah pendekatan sektoral (strategi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tidak sistematis, komprehensif dan terintegrasi), kebijakan yang tidak sinkron, inkonsisten, mekanisme dan prosedur tidak transparan dan terkoordinir, kegiatan atau program tidak terkoordinir dan penegakan hukum lemah. Penguatan kelembagaan Karhutla diperlukan kelembagaan yang mempunyai otoritas tingkat provinsi dan meningkatkan efektivitas program kerja dengan mengubah pendekatan sektoral menjadi fungsional dengan melibatkan publik yakni pengusaha dan tokoh masyarakat.

Hasil Wawancara Narasumber BPBD Situbondo Narasumber: Pusdalog, Satdata, & Informasi Tanggal: 7 Juni 2023

## Bagaimana sudut pandang perpektif Anda dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Situbondo? Apa penyebab kebakaran hutan dan lahan di RPH Kendit, Panarukan pada tahun 2022?

Kebakaran hutan dan lahan ini merupakan permasalahan yang sangat penting karena berdampak pada hilangnya ekosistem dari hutan dan potensi lain yang terkandung di dalamnya temasuk keanekaragaman hayati. Dampak kebakaran hutan dan lahan yang menonjol adalah terjadinya kabut asap yang menganggu kesehatan dan sistem transpotasi darat, laut dan udara. Intensitas gangguan terhadap hutan ini, semakin meningkat dari waktu ke waktu baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia. Kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo di setiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif atau naik turun. Periode tahun 2015-2022 terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 86 kejadian. Kasus kebakaran hutan dan lahan tertinggi pada tahun 2019 lalu disusul pada tahun 2022. Frekuensi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, Puncak kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 31 kejadian. Kasus kebakaran hutan terakhir di kabupaten situbondo terjadi pada tahun 2022 di daerah balung kecamatan kendit. kebakaran seluas 2,5 Ha hutan jati di Desa Balung, Kecamatan Kendit pada petak 50 K Kelas hutan TKTBP, RPH Kendit, BKPH Panarukan akibat dari cuaca yang cukup panas karena kemarau panjang dan dugaan sementara sumber api yang membakar hutan jati di

wilayah RPH Kendit ini, berasal dari pembakaran daun tebu yang ditebang

## Apakah proses implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan?

Penanggulangan kebakaran hutan tetap kita sesuaikan dengan undang- undang nomor 41 tahun 1999, namun kita juga mengikuti SOP penyelenggaraan penanggulangan bencana alam sesuai dengan perpres nomor 21 tahun 2008. Proses pada penanggulangan bencana jika disesuaikan dengan undang-undang diantaranya itu mendatangi lokasi tempat kejadian, pendataan dan dokumentasi, koordinasi dengan forkopimka kendit, membantu memadamkan api pakai dahan kayu dan peralatan seadanya. Lalu kita melalakukan koordinasi dengan pemadam kebakaran, perhutani, polres, kodim/koramil, dan beberapa instansi terkait untuk bersama-sama melakukan penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Karena Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan asap menyakitkan bagi makhluk hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 dan PP No. 4 tahun 2001, kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab setiap warga, dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat. Langkah lain yang kita lakukan antara lain melaporkan kejadian ke BNPB Jakarta, BNPB Jawa Timur, dan instansi terkait

## Bagaimana penyelesaian kendala selama proses implementasi kebijakan penanggulan kebakaran hutan di Kabupaten Situbondo sesuai perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan?

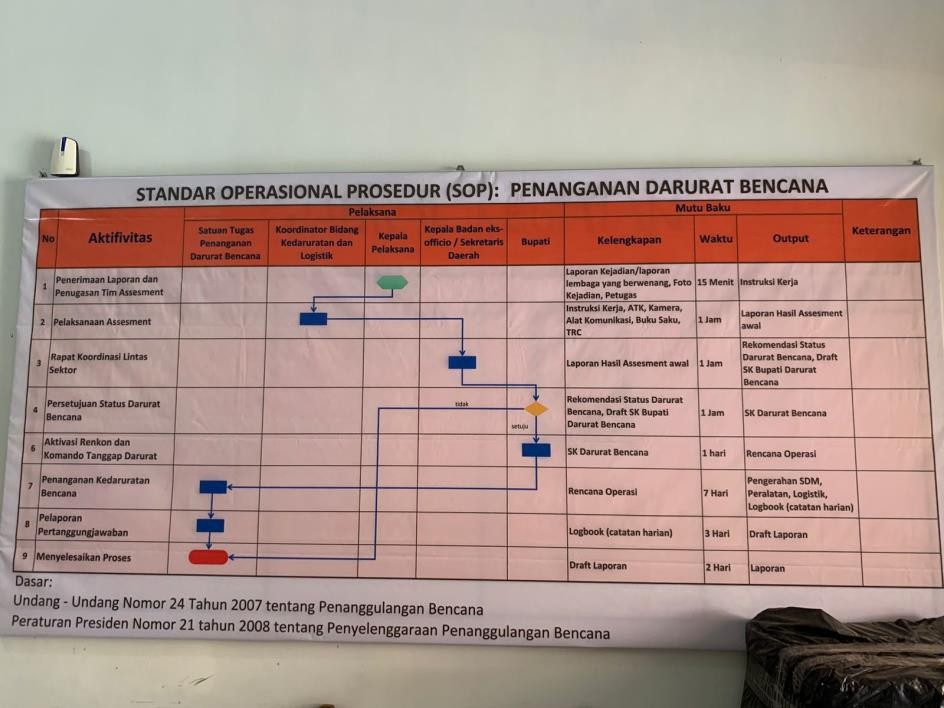
Upaya pemadaman kebakaran hutan kita menyesuaikan dengan isi dari undang-undang nomor 41 tahun 1999, karena yang menjadi dasar dalam proses pemadaman kebakaran hutan, adalah undang-undang terkait. Namun, jika mengikuti aturan presiden di tahun 2015 salah satu upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait karena Koordinasi antar Lembaga dalam kasus kebakaran hutan diperlukan untuk menanggulangi secara bersama kejadian kebakaran hutan. Koordinasi dilakukan untuk mengawali proses terhadap suatu objek kejadian, lalu dilakukan komunikasi pembuatan keputusan.

Kendala selama proses penanggulan kebakaran hutan yang sering terjadi di kabupaten situbondo adalah akses masuk ke wilayah hutan, khususnya kendaraan berat atau mobil dinas kebakaran atau mobil BPBD. Apabila kasus kebakaran hutan dan lahan mengalami suatu kendala, maka penyelesaian utama selama proses penanggulan kebakaran hutan melihat keadaan dan kondisi di TKP (tempat kejadian perkara), seperti sterilisasi posisi aman dari warga, melihat dan menyesuaikan kobaran api (disesuaikan dengan keadaan), penyelamatan manusia dan hewan.

## Apa saja kelemahan serta kekurangan dalam mencegah dan menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Situbondo?

Kelemahan dan kendala penanggulangan kebakaran hutan dan lahan lebih terfokus pada penanganan pemadaman kebakaran. Kita sendiri mengetahui bahwa Kebakaran hutan merupakan kejadian alam yang tidak dapat diprediksi tetapi dapat dicegah. Kebijakan pengendalian kebakaran hutan sebaiknya diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya hotspot dibandingkan dengan kebijakan saat ini yang lebih cenderung pada upaya pemadaman kebakaran hutan. Perubahan paradigma pengendalian kebakaran hutan ini perlu didukung dengan sosialisasi, dukungan anggaran, sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan. Pengendalian kebakaran hutan secara umum dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut seperti, pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran yang dilakukan di mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kesatuan pengelolaan hutan.

**Lampiran 3.** Dokumentasi Penelitian



Sumber: Pribadi.



Sumber: Pribadi